

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah perbankan dan pernah disampaikan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Wahyuningsih (2002) dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan Oleh Perbankan di Indonesia dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa penghimpunan dana tabungan oleh perbankan di Indonesia secara simultan dipengaruhi oleh tingkat inflasi (Y_1), tingkat bunga (X_2), dan tingkat inflasi (X_3). Sedangkan secara parsial hanya pendapatan masyarakat saja yang berpengaruh terhadap tabungan masyarakat (Y), hal ini ditunjukkan dengan perhitungan $t_{hitung} = -1,6027 < t_{tabel} = 2,306$ untuk tingkat bunga.
2. Rustianan (2000) dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Penghimpunan Deposito Berjangka pada Bank Umum di Indonesia” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara pendapatan perkapita (X_1), dan suku bunga (X_2) sebagai variabel bebas baik secara simultan maupun secara parsial, sedangkan tingkat inflasi (X_3), tidak terdapat pengaruh yang nyata secara parsial tetapi

berpengaruh yang nyata secara simultan terhadap usaha penghimpunan deposito berjangka pada bank umum di Indonesia (Y). Sedangkan secara parsial pendapatan perkapita dan suku bunga berpengaruh nyata terhadap tabungan masyarakat yang ditunjukkan dengan $t_{hitung} = 3,089 > t_{tabel} = 2,447$ untuk pendapatan perkapita, dan $t_{hitung} = 2,251 > t_{tabel} = 2,447$ untuk suku bunga. Sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap tabungan dimana $t_{hitung} = 2,251 > t_{tabel} = 2,447$.

3. Rudy (2004) dengan judul “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia”. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara simultan (uji F) diperoleh bahwa Tingkat Bagi Hasil (X_1), Tingkat Suku Bunga (X_2) dan Jumlah Kantor Bank (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia (Y) dengan $F_{hitung} = 60,790 > F_{tabel} = 3,29$. Sedangkan hasil analisis secara parsial Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesiadengan $T_{hitung} = 2,131$. Untuk tingkat suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia dengan $T_{hitung} = -0,887 < T_{tabel} = 2,131$. Sedangkan Jumlah Kantor Bank berpengaruh positif terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia dengan $T_{hitung} = 2,235 > T_{tabel} = 2,131$

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank

2.2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank pada awal dikenalnya adalah meja tempat menukar uang .Lalu pengertian berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Namun semakin moderennya perbembangan dunia perbankan,maka pengertian bank pun berubah pula.“Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. (Kasmir, 2004 : 8)

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediaries), yang menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana (idle fund/ surplus unit) kepada pihak emebutuhkan dana atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan”. (Dendawijaya, 2003 :25)

Pengertian Bank menurut pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jadi pengertian Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana itu kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.

2.2.1.2 Fungsi Bank

Bank yang bertindak sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai penghubung antara pihak yang dengan pihak yang membutuhkan dana. Tetapi pada dasarnya bank memiliki tiga fungsi sebagai berikut :

1. Menghimpun dana (funding) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Bank memberikan surat atau selemba kertas dalam bentuk:
 - a. Giro (Demand Deposito)
 - b. Deposito Berjangka(Time Deposito)
 - c. Tabungan (Saving Deposit)
2. Menyalurkan dana (lending) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat.. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services) seperti pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (kliring), penagihan surat-surat berharga yang berasal

dari luar negeri (inkaso), Letter of Credit (LC), Safe Deposit Box, Bank Garansi, Bank Notes, Travellers Cheque dan jasa lain.

Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa bank mempunyai fungsi yang sangat luas dalam suatu Perekonomian Negara, karena bank merupakan alat untuk menjaga kestabilan moneter dan keuangan. Bank mempunyai fungsi utama dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam hal ini bank berperan juga dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. (Kasmir, 2004 : 9)

2.2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Di Indonesia saat ini terdapat berbagai jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang- Undang Perbankan. Penggolongan jenis-jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, segi kepemilikannya status dan cara menentukan harga.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi, antara lain: (Kasmir, 2004 : 18)

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang- Undang Pokok perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: (Kasmir, 2004 : 18-20)

a. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikan

Jenis Bank berdasarkan kepemilikan ini dapat dilihat dari Akte Pendirian dan Penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah (Kasmir, 2004 : 20-22)

a. Bank Milik Pemerintah (BUMN)

Bank yang Akte Pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia , sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh : BNI 46, BRI, BTN, Bank Mandiri

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendirian bank ini juga dimiliki oleh pihak swasta nasional.

Contoh : BCA, Bank Danamon, Bank Mega, Muamalat, Bank Niaga, Lippo Bank, Bank Permata.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum Koperasi.

Contoh : Bank Bukopin

d. Bank Milik Asing

Bank yang kepemilikan sahamnya 100% oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia.

Contoh : ABN Amro Bank, American Express Bank, City Bank, Hongkong bank, Standard Chaterd Bank

e. Bank Milik Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional

Contoh : Inter Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank

3. Dilihat dari segi status

Jenis ini dilihat dari segi kemampuannya untuk melayani masyarakat, terbagi menjadi : (Kasmir, 2004 :22-23)

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

Contoh : Transfer ke luar negeri, Traveller Chaque, Pembukaan dan pembayaran Letter of Credit

b. Bank Non Devisa

Bank ini mempunyai fungsi yang berkebalikan dengan bank devisi. Bank ini melakukan transfer masih dalam batas-batas Negara (dalam negeri)

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Di Indonesia mulanya hanya ada satu kelompok, namun hadirnya bank Syariah sejak tahun 1990 jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, terbagi dalam 2 kelompok : (Kasmir, 2004 : 23-25)

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based.

- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan bunga ini dikenal dengan istilah fee based.

2.2.1.4 Total Aktiva Bank

Asset atau aktiva menggambarkan pola pengalokasian dana bank.

(Dendawijaya, 2003 : 110)

Total aktiva bank umum adalah jumlah semua aktiva yang dimiliki oleh bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional.

(Boediono, 2001 : 119)

2.2.2 Kesehatan Bank

2.2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melakukan seluruh kegiatan usaha perbankannya.

(Sri, dkk, 2000 : 22)

2.2.2.2 Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. UU tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa : (Sri, dkk, 2000 : 22-23)

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip umum bank dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak Bank dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
- c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memeberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

- e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank.
- f. Bank wajib menyampaikan kepada bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik.
- g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga bank tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank-bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana, sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

2.2.3 Pengertian Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagai mana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia. (Hasibun, 2002 : 36)

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Siamat, 2004 : 88)

Bank Umum dalam usahanya bertindak sebagai pengumpul dana dalam bentuk simpanan, baik giro tabungan maupun deposito. Bank Umum ini dapat diselenggarakan atau dimiliki pemerintah, swasta nasional, koperasi atau asing. (Dendawijaya, 2003 : 89)

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Umum adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Iswardono, 2004 : 121)

2.2.3.1 Fungsi dan Tugas Pokok Bank Umum

Fungsi dan Tugas Pokok Bank Umum adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

(Hasibun, 2002 : 36)

1. Simpanan Giro

Giro atau demand deposit sering juga disebut cheking account adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan (bilyet giro).

Setiap pemilik rekening giro (giran) diberikan buku cek dan bilyet giro sebagai instrumen untuk melakukan penarikan dana atau pembayaran suatu transaksi. Cek dapat digunakan untuk suatu pembayaran transaksi secara tunai, cek dapat di tarik atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang ataupun di curi dengan dibuktikan oleh laporan hilang dari kepolisian. Sedangkan bilyet giro pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukuan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal yang

ditentukan kepada pihak yang tercantum dalam warkat bilyet giro tersebut. (Siamat, 2004 : 116)

Perhitungan Bunga Giro

- Perhitungan dengan menggunakan saldo terendah

$$= \frac{\text{Bunga (\%)} \times \text{Saldo terendah}}{12 \text{ Bulan}}$$

- Perhitungan dengan menggunakan saldo rata-rata

$$= \frac{\text{Saldo rata-rata} \times \text{Hari} \times \text{Suku Bunga}}{360 \text{ Hari}}$$

(Siamat, 2004 : 117-118)

3. Simpanan Tabungan

Tabungan (savings deposit) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. (Siamat, 2004 : 119)

Perhitungan Bunga Tabungan

- Perhitungan dengan saldo terendah

$$= \frac{\text{Bunga} \times \text{Saldo terendah}}{12 \text{ Bulan}}$$

- Perhitungan dengan saldo harian

$$= \frac{\text{Bunga} \times \text{Saldo harian}}{360 \text{ Hari}}$$

(Siamat, 2004 : 119)

4. Simpanan Deposito Berjangka

Deposito berjangka (time deposit) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Sumber dana ini memiliki ciri-ciri pokok yaitu jangka waktu penarikannya tetap, oleh karena itu sering disebut fixed deposit umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Deposito berjangka ini hanya dapat ditarik atau diuangkan pada saat jatuh temponya oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposit. Oleh karena itu, deposito berjangka merupakan simpanan atas nama. (Siamat, 2004 : 118)

2.2.4. Konsep Bank Syariah

Pada dasarnya konsep bank syariah dalam menjalankan usahanya sama dengan bank konvensional lainnya seperti memberikan kredit, jasa-jasa lalu lintas pembayaran, dan peredaran uang. Tetapi bank syaria'h dalam menjalankan usahanya tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur produk dan operasionalnya. Salah satu ketentuan syariah itu adalah bank syariah tidak menerapkan sistem bunga pada berbagai produknya, dan ini merupakan perbedaan yang paling mendasar dari kedua konsep bank tersebut.

Dasar utama sistem perbankan Islam, menurut (Lewis, 2001: 55), terdiri atas beberapa elemen penting yakni:

- a. Riba dilarang dalam semua transaksi.
- b. Bisnis dan investasi dijalankan berdasarkan aktifitas-aktifitas yang halal.
- c. Transaksi harus bebas dari unsur gharar (spekulasi atau ketidakpastian).
- d. Zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan masyarakat.
- e. Semua aktifitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip islam, dengan dewan syariah khusus sebagai pengawas.

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk mewujudkan terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana. Secara garis besar konsep bank syariah terdiri atas lima konsep aqad. Berdasarkan atas lima konsep ini dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah, lima konsep tersebut adalah:

1. Prinsip simpanan murni (al-wadi'ah)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk al-wadi'ah. Fasilitas al-wadi'ah biasanya diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. al-wadi'ah identik dengan giro dalam bank konvensional. (Muhammad, 2002: 17)

2. Bagi hasil (al-mudharabah)

Al-mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha. Pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek/usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengusaha. (Sumitro, 2002: 32)

3. Prinsip jual beli (al-murabahah)

Prinsip jual beli ini (al-murabahah) salah satu sistem yang menerapkan tata cara jual beli. Bank akan memberi terlebih dahulu barang yang di butuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). (Muhammad, 2002: 85)

4. Prinsip sewa (al-ijarah)

al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas bunga dan jasa melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Ascarya, 2007: 101)

5. Prinsip jasa/fee

Prinsip jasa ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah garansi bank, kliring, inkaso, jasa transfer, dan lain-lain. (Muhammad, 2002: 85)

2.2.5. Produk Oprasional Bank Syariah

Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. produk penghimpunan dana
2. produk penyaluran dana
3. produk jasa

2.2.5.1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpun dana pada bank syariah, menurut Antonio, terbagi atas dua akad yakni wadi'ah dan mudharabah.

1. wadi'ah

wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun badan hukum yang harus di jaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Prinsip wadiah dalam produk bank syariah dapat dikembangkan menjadi dua jenis yaitu:

- a) Yad Al-Amanah, yaitu pihak penyimpan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.
- b) Yad al-dhamanah, yaitu pihak penyimpan yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang tersebut. Bank

sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan al-wadi'ah untuk tujuan.

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yakni pihak pertama (shahibul mall) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis:

- a. mudharabah muthalaqah, adalah bentuk kerja sama antara dua pihak yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah muqayyadah, adalah pihak kedua dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si pihak pertama dalam memasuki jenis dunia usaha.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan, pada sisi penghimpunan dana, mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban dan tabungan deposito biasa.

- b. Deposito spesial, yaitu dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya jual beli atau sewa menyewa. (Antonio, 2002: 85)

2.2.5.2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah, menurut Antonio, dapat dikembangkan menjadi tiga model, yaitu:

1. Prinsip jual beli

Mekanisme jual beli adalah upaya yang dilakukan dengan pola transfer of property dan tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi harga jual barang. Prinsip ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Al-murabahah

Al-murabahah adalah jual beli dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam muarabahah penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C). kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja.

b. As-salam

As-salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Bank sebagai pembeli nasabah sebagai penjual. As-salam biasanya digunakan pada pembiayaan petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan, dan juga dapat di aplikasikan pada pembiayaan industri.

c. Al-istishna

Al-istishna merupakan akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Istishna diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Prinsip sewa (al-ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Prinsip ini terdiri atas :

a. Al-ijarah

Al-ijarah adalah akad pemindah hak guna dasar barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b. Al-ijarah al-muntahiha bit tamlik

Al-ijarah al-muntahiha bit tamlik adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.

- c. Bank-bank islam yang mengoperasikan produk al-ijarah dapat melakukan leasing, baik dalam bentuk oprating lease maupun financial lease. Akan tetapi pada umumnya bank-bank islam lebih banyak menggunakan Al-ijarah al-muntahiha bit tamlik karena lebih sederhana dari sisi pembukuan.

3. Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut:

a. Al-musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah ada dua jenis:

- a.1. Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan dan wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih, dalam musyarakah kepemilikan dua orang atau lebih terbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagai pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.
- a.2. Musyarakah akad (kontrak), tercipta dengan cara kesepakatan dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai

proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dan tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Al-mudharabah

Mudharabah adalah kerjasama antara dua belah pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak secara umum mudharabah terbagi atas dua jenis yaitu:

b.1. Mudharabah muthaloqah

Mudharabah muthaloqah adalah bentuk kerjasama yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b.2. Mudharabah muIqayyadah

Mudharabah muIqayyadah yaitu pihak kedua dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan pihak pertama dalam memasuki jenis dunia usaha.

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaa. Adapun pada sisi pembiayaan Mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, merupakan sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pihak pertama. (Antonio, 2001: 101)

2.2.5.3. Produk Jasa

Dalam pelayanan jasa ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

1. Al-hawalah

Al-hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal:

- a. factoring atau anjak piutang, yaitu para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b. Post dated check, yaitu bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. Bill discounting, secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah, hanya saja dalam bill discounting nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah.

2. Ar-rahn

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Kontrak ar-rahn dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap atau akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- b. Akad ar-rahn dipakai sebagai alternatif dari penggadaian konvensional, bedanya dengan penggadaian bisa dalam rahn nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga penggadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.

3. Al-wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat, dalam hal ini nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya untuk melakukan pekerjaan jasa tertentu. Secara umum, aplikasi wakalah dalam perbankan dapat diterapkan, misalnya: transfer dan sebagainya.

4. Al-kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai jaminan. (Sudarsono, 2003: 77)

5. Al-Sharf

Al-Sharf adalah perjanjian jual-beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya, transaksi ini dapat dilakukan baik dengan semata-mata uang yang sejenis dan mata uang asing lainnya.

6. Al-Qardh

Al-Qardh adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. (Budisantoso, 2006: 161)

2.2.6. Sistem Bagi Hasil Bank Syariah

Tingkat bagi hasil adalah prosentase tingkat keuntungan yang didapat oleh nasabah sebagai bentuk kompensasi atas dana masyarakat yang dikelola oleh bank. Salah satu perbedaan prinsip antara bank syariah dengan bank konvensional adalah pada tatacara atau ketentuan pemberian imbalan. Bank konvensional memberikan imbalan dalam bentuk bunga sedangkan bank syariah memberikan imbalan dalam bentuk bagi hasil. Dengan demikian realisasi imbalan yang diterima nasabah akan berbeda-beda setiap bulanya, tergantung dari pendapatan investasi yang dilakukan bank pada bulan bersangkutan. Menurut (Algaoud dan Lewis 2001: 64), yang menjadikan sistem bagi hasil boleh dalam islam, sementara sistem bunga tidak boleh, kerana dalam sistem bagi hasil, yang ditetapkan sebelumnya hanyalah rasio (nisbah), bukan tingkat keuntungannya.

Secara syariah ada dua instrumen bagi hasil dalam sistem bank syariah yaitu mudharabah dan musyarakah. Diantara kedua model ini maka mudharabah

adalah metode yang paling umum digunakan. Berdasarkan metode ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan peminjam dana. Dengan penabung bank bertindak sebagai pengelola dana dan disisi lain, dengan peminjam dana, bank akan bertindak sebagai pemilik dana.

Dalam menjalankan prinsip bagi hasil, ada beberapa faktor penting yang menentukan besar kecilnya prosentase keuntungan yang akan dibagikan antara pihak bank dan penabung maupun dengan peminjam dana, faktor-faktor tersebut, menurut (Antonio 2001: 139), ialah:

- a. Investement rate, merupakan prosentase aktual dana yang di investasikan dari total dana bank.
- b. Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Investemen rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk di investasikan, akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan.
- c. Nisbah bagi hasil (profit sharing ratio).

Pada dasarnya, menurut (Muhammad 2002: 110), bank bagi hasil memberikan keuntungan pada deposan dengan pendekatan loan to deposit ratio (LDR), sedangkan bank konvensional dengan pendekatan biaya. Artinya, dengan mengakui pendapatan, bank syariah menimbang rasio antara dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan, serta pendapatan yang dihasilkan dari perpaduan dua hal tersebut. Sedangkan bank konvensional langsung menganggap semua bunga yang diberikan adalah

biaya, tanpa memperhitungkan berapa pendapatan yang dapat dihasilkan dari dana yang di himpun tersebut. Maka dalam hal ini, bank syariah terdapat unsur ketidak pastian dalam memperoleh keuntungan, karena berapa rupiah pendapatan Riil yang akan diperoleh nasabah sangat bergantung kepada pendapatan yang akan diperoleh bank.

Maka agar tetap dapat bersaing dengan bank konvensional, bank syariah memberikan special nisbah yang kira-kira indikasinya sama dengan special rate pada bank konvensional. Caranya dengan mengurangi porsi bank atau dengan kata lain menambah biaya bagi hasil dana pihak ketiga. Special nisbah yang diberikan hendaklah memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Muhammad, 2002: 111) :

1. nisbah bagi hasil
2. bobot
3. pendapatan
4. rata-rata saldo harian produk simpanan

Dengan demikian, jelas bahwa bank syariah tetap menguntungkan dan memberi bagian keuntungan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu nasabah (debitur/deposan) dan bank. Keuntungan yang diperoleh bukan berdasarkan bunga yang dihitung terhadap saldo simpanan atau besarnya kredit, namun persen dari pendapatan riil nasabah debitur dan bank. Perbedaan bank diakui pada saat bagi hasil diterima (cash based) bukan bunga yang masih akan diterima (accrual based).

Cara menghitung penentuan tingkat bagi hasil menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Saldo Rata-Rata Harian Nasabah}}{\text{jumlah Dana Pihak Ketiga}} \times \text{laba/rugi tahun berjalan} = A$$

$A \times \% \text{Bagi Hasil} = \text{Tingkat Bagi Hasil}$

2.2.7 Sertifikat Bank Indonesia

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, salah satu fungsi Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam melaksanakan tugasnya, BI menggunakan beberapa piranti moneter yang terdiri dari Giro Wajib Minimum (Reserve Requirement), fasilitas diskonto, Himbauan moral, dan Operasi Pasar Terbuka BI dapat melakukan transaksi jual beli surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). (Manurung, 2004 : 112)

2.2.7.1 Pengertian SBI

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.8/13/DPM tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui lelang, Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. (Manurung, 2004 : 112)

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dalam sistem diskonto oleh Bank

Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka pendek yang dinyatakan dalam satuan prosentase. (Rivai, 2006 : 26)

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang dapat diperjual belikan dan dapat dijadikan likuiditas sekunder. (Iqbal, 2001 : 23)

Dapat disimpulkan bahwa SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka pendek. (Siamat, 2004 : 8)

2.2.7.2 Tujuan Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia

Sebagai Otoritas Moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal+uang giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan nilai Rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut. (Manurung, 2004 : 113)

2.2.7.3 Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia

SBI memiliki karakteristik sebagai berikut : (www.bi.go.id)

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan dan semetara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan.
2. Denominasi : dari yang terendah Rp50 Juta sampai dengan tertinggi Rp100 Miliar.

3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp100 Juta dan selebihnya dengan kelipatan Rp50 Juta.
4. Pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai berdasarkan diskonto murni (true discount) yang diperoleh dari rumusan berikut ini :

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})\}}$$

2.2.7.4 Pengertian Suku Bunga

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Jadi, suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. (Puspoprano, 2004 : 70)

Suku bunga adalah harga yang dibebankan oleh unit ekonomi yang mengalami surplus (unit surplus) pada unit ekonomi yang mengalami defisit (unit defisit) atas pinjaman yang diberikan dari tabungannya. Suku bunga adalah harga yang dibayar “peminjam” (debitur) kepada ”pihak yang meminjamkan” (kreditur) untuk pemakaian sumber dana seluruh interval waktu tertentu. Jumlah pinjaman yang diberikan disebut principal, dan harga yang dibayar biasanya diekspresikan sebagai persentase dari principal per unit waktu (umumnya pertahun). (Fabozzi, dkk, 2003 : 204)

Tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang atau dana untuk jangka waktu tertentu atau biasanya juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga biasanya juga dinyatakan sebagai harga yang harus diyar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah di masa yang akan datang dengan demikian tingkat suku bunga berkaitan sekali dengan kurun waktu di dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. (Kasmir, 2003 : 39)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah tingkat balas jasa yang diperoleh oleh masyarakat atas sejumlah dana atau pinjaman yang telah diterima selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase (%).

Dilihat dari sisi nasabah yang paling menarik dari deposito adalah tingkat bunganya. Karena deposito merupakan simpanan yang memberikan bunga tertinggi dibanding jenis simpanan yang lainnya seperti tabungan dan giro. Sedangkan perbankan memandang bahwa produk deposito merupakan produk yang dapat memberikan keleluasaan bagi bank untuk dapat mengoptimalkan investasi dananya dalam berbagai kegiatan. Seperti kredit dan surat-surat berharga.

2.2.8 Inflasi

2.2.8.1. Pengertian Inflasi

Beberapa pengertian mengenai inflasi adalah sebagai berikut :

1. Pengertian singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. (Boediono, 2001: 155)
Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. (Nopirin, 2000 : 25)
2. Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dominan disamping masalah pengangguran yang sudah sejak lama dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. (Iswardono, 2004 : 49)
3. Inflasi merupakan peristiwa moneter yang terjadi di semua negara yang dianggap sebagai penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya. (Manurung, 2004 : 58)

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian inflasi adalah naiknya harga-harga barang secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu dan diperlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya.

2.2.8.2. Klasifikasi Inflasi

A. Jenis inflasi menurut sifatnya

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi atas dasar pernah atau tidaknya inflasi tersebut. Beberapa macam inflasi tersebut adalah :

1. Inflasi ringan, ditandai dengan laju inflasi yang rendah yaitu kurang dari 10% per tahun.
2. Inflasi menengah, ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar yaitu sampai 2 digit bahkan 3 digit. Dan kadangkala berjalan dalam waktu yang relatif pendek. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang ringan.
3. Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja.

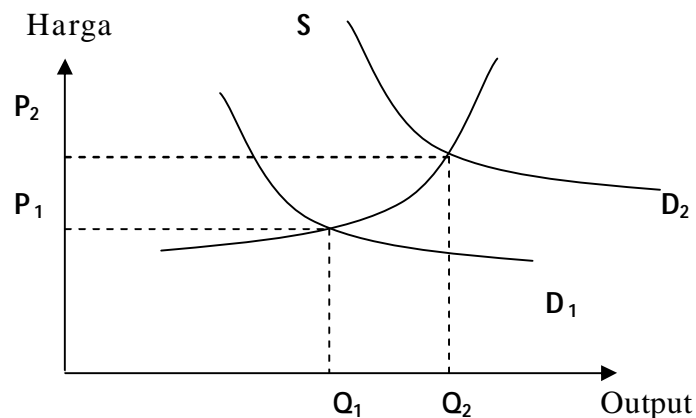
B. Jenis inflasi menurut sebabnya

1. Demand pull inflation

Inflasi yang timbul karena adanya permintaan total akan berbagai barang terlalu kuat, sedangkan kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh (full employment). Dalam keadaan ini kenaikan hasil produksi (output). Apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya

hanyalah menaikkan harga saja. Proses terjadinya (demand pull inflation) dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1 : Kurva Demand Pull Inflation



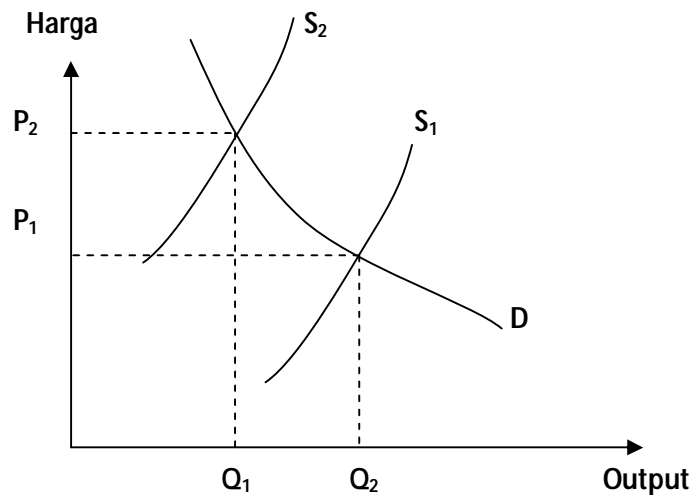
Sumber : Boediono, 2001. Ekonomi Makro, Penerbit BPFE, UGM, Yogyakarta, halaman 156

Kedua permintaan masyarakat akan barang-barang (agregate) bertambah (misal, karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang atau barang investasi swasta karena kredit yang murah), maka kurva aggregate demand bergeser dari D_1 ke D_2 akibatnya tingkat harga umum naik dari P_1 ke P_2 .

2. Cost Push Inflation

Inflasi yang disebabkan turunnya produksi, karena naiknya biaya produksi. Apabila proses ini berjalan terus menerus maka timbullah cost push inflation. proses terjadinya cost push inflation dapat di jelaskan pada gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2 : Kurva Cost Push Inflation



Sumber : Boediono, 2001. Ekonomi Makro, Penerbit BPFE, UGM, Yogyakarta, hal 157

Bila ongkos produksi naik dari P_1 ke P_2 (misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang di datangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (agregat suplai) bergeser dari S_1 ke S_2 .

C. Jenis inflasi berdasarkan asalnya

Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan sebagai berikut :
(Boediono, 2001 : 164)

1. Inflasi yang berasal yang dalam negeri (Domestic Inflation) adalah inflasi yang timbul karena adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported Inflation) adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga langganan berdagang. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan kenaikan indeks biaya hidup, karena sebagian barang-barang yang tercakup didalamnya berasal dari impor selain itu juga secara tidak langsung akan menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dan kemudian harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah yang harus impor.

2.2.8.3. Akibat Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor-faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan equity effecty. Sedangkan efek terhadap alokasi faktor-faktor produksi nasional masing-masing disebut dengan efficiency dan output effects.

Efek terhadap pendapatan (Equity Effects) sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan dengan adanya inflasi. Sebaiknya pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi.

Efek terhadap efisiensi (Efficiency Effects) yaitu inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Penambahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.

Efek terhadap output (output effects) yaitu inflasi dapat menyebabkan adanya kenaikan produksi. Dengan alasan dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan usaha naik dan akan mendorong peningkatan produksi, namun jika laju inflasi terlalu tinggi maka akan mempunyai akibat sebaliknya yaitu penurunan output, dalam keadaan inflasi yang tinggi nilai uang riil turun, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian keadaan inflasi bisa diikuti dengan penurunan output.

2.2.8.4. Cara pengendalian inflasi.

Inflasi dapat terjadi karena besarnya uang beredar di masyarakat oleh karena itu mencegah lajunya inflasi adalah dengan pengendalian uang beredar di masyarakat tersebut dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan yang berkaitan dengan produksi.

Sasaran kebijakan moneter dapat dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar salah satu komponen jumlah uang beredar adalah uang giral. Bank sentral dapat mengatur jumlah uang giral ini melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi cadangan minimum dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil.

Bank sentral dapat menggunakan suatu pengendalian yang disebut dengan tingkat diskonto untuk pinjaman yang diberikan oleh Bank sentral. Apabila tingkat diskonto dinaikkan oleh Bank sentral maka keinginan bank umum menjamin menjadi semakin kecil, sehingga cadangan yang ada di Bank sentral juga semakin kecil. Akibatnya kemampuan bank umum memberikan pinjaman pada masyarakat semakin kecil sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah.

Kebijakan fiskal menyangkut peraturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal yang berupa pengeluaran-pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan biaya masuk sehingga impor barang meningkat. Bertambahnya jumlah barang

di dalam negeri cenderung akan menurunkan harga.
(Nopirin, 2000 : 35)

2.2.9 Kurs Rupiah terhadap US \$

2.2.9.1. Pengertian Kurs Rupiah terhadap US \$

Kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda dan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut.
(Nopirin, 2000 : 163)

Kurs atau nilai tukar adalah jumlah atau harga mata uang domestik dari mata uang luar negeri (asing) atau rasio antara satu unit (satuan) mata uang dan jumlah mata uang yang lain pada waktu tertentu.
(Salvatore, 2004 : 140)

Kurs adalah nilai tukar suatu mata uang dengan mata uang Negara lainnya yang ditetapkan. (Sukirno, 2002 : 103)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurs merupakan perbandingan antara mata uang Negara satu dengan Negara lain yang didalamnya terdapat perbandingan nilai sehingga untuk mendapatkan maka harus menukarkan mata uang tersebut agar memperoleh satu unit mata uang asing.

Masih tingginya tekanan terhadap nilai tukar maka akan mengakibatkan tingginya suku bunga. Tingginya ketidakpastian dalam banyak aspek baik sosial, politik, maupun ekonomi telah banyak

mempengaruhi perilaku dan ekspektasi para pelaku pasar valas terhadap kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini tercermin pada pergerakan premi or ward yang berada pada tingkat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut tidak kondusif untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di dalam negeri sehingga mengakibatkan suku bunga yang cukup tinggi.

Sifat kurs valuta asing sangat tergantung dari sifat pasar, apabila transaksi jual beli valas dapat dilakukan secara bebas, maka kurs valas akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Apabila pemerintah menjalankan kebijaksanaan stabilisasi kurs, tetapi tidak dengan mempengaruhi transaksi swasta, maka kurs ini hanya akan berubah-ubah dalam batas yang kecil, meskipun batas-batas ini dapat diubah dari waktu ke waktu, pemerintahan yang dapat menguasai sepenuhnya transaksi valas. (Nopirin, 2000 : 172)

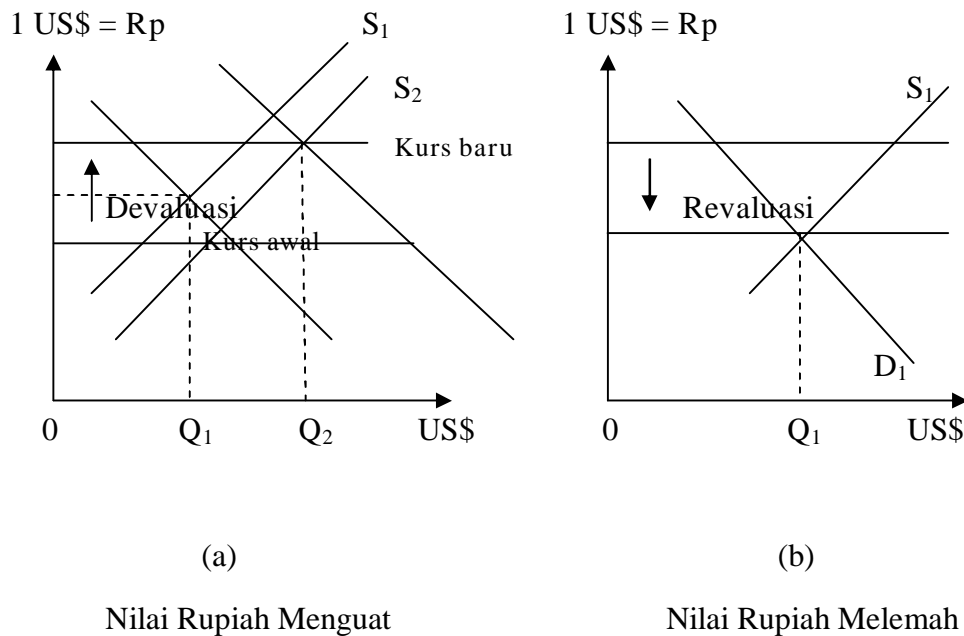
2.2.9.2 Sistem Kurs Valuta Asing

1. Sistem kurs tetap

Kurs tetap bukan merupakan kurs yang secara permanen abadi dan tetap, tetapi kurs lebih merupakan sistemnya yang diperkenalkan untuk berfluktuasi dalam batas sempit yang mengelilingi nilai prioritas dimana keduanya tetap berdiri dan kekal. (Suparmoko, 2000 : 370)

Dalam sistem kurs tetap, kurs ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. Kelebihan dari sistem ini adalah adanya kepastian nilai tukar yang dapat meningkatkan ekspektasi. Tetapi kelemahannya adalah kurs yang berlaku tidak selalu menggambarkan tingkat kelangkaan yang sebenarnya. Bisa terjadi nilai tukar yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi dibandingkan dengan kurs pasar (overvalued). Atau sebaliknya, nilai tukar yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah dibanding dengan kurs pasar (undervalued). Bila selisih kurs yang ditetapkan dianggap terlalu jauh, maka pemerintah melakukan koreksi. Koreksi atas nilai tukar yang dinilai terlalu tinggi disebut devaluasi (devaluation), sedangkan koreksi untuk nilai tukar yang dinilai terlalu rendah disebut revaluasi (revaluation). Jadi revaluasi dan devaluasi pada prinsipnya juga merupakan koreksi atas nilai tukar, seperti halnya dengan apresiasi dan depresiasi berdasarkan mekanisme pasar. Kondisi-kondisi yang dimaksud dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva sebagai berikut : (Manurung, 2004 : 76)

Gambar 3:
Penentuan Nilai Tukar Dalam Sistem Kurs Tetap



Sumber : Manurung, Mandala, 2004, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (kajian Konstektual Indonesia), Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, halaman 76.

2. Sistem kurs mengambang.

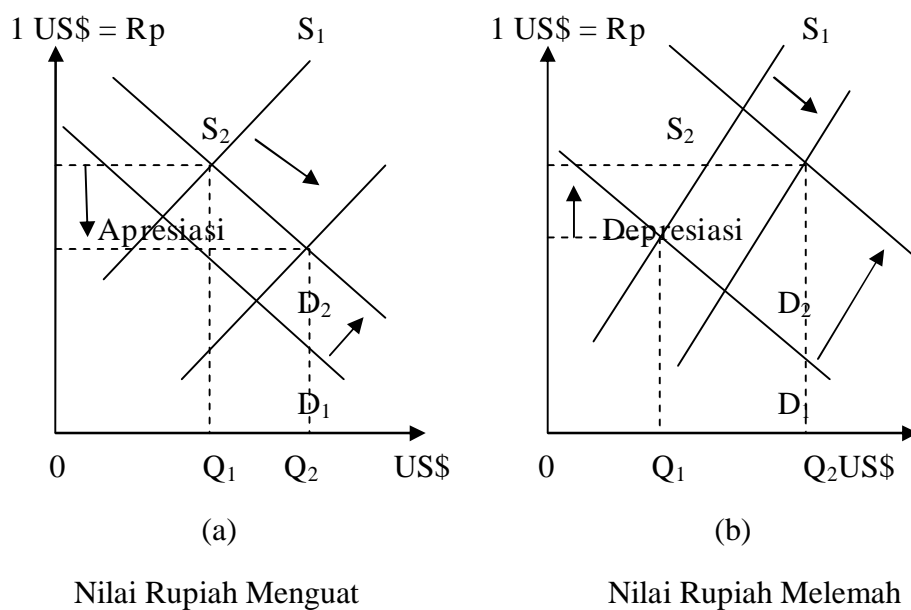
Karakteristik dalam sistem kurs mengambang yaitu berfluktuasi dengan bebas sebagai reaksi perubahan permintaan dan penawaran valuta asing. Sistem kurs mengambang tercipta pada tahun 1973. sistem kurs ini merupakan sistem kurs yang paling sederhana dan sesuai dengan modal persaingan kompetitif, dimana terdapat campur tangan pemerintah untuk mendukung kurs sehingga kurs bebas bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar dan juga faktor-faktor yang mendasari permintaan dan penawaran valuta

asing. Implikasinya adalah bahwa sistem kurs mengambang akan lebih berfluktuasi dari pada sistem kurs tetap. (Suparmoko, 2000 : 370)

Bila pertumbuhan permintaan lebih cepat dari pertumbuhan penawarannya maka mata uang tersebut akan semakin mahal (mengalami apresiasi). Bila nilai tukarnya melemah, atau mengalami depresiasi, maka artinya pertumbuhan permintaan lebih lambat dari pertumbuhan penawaran. Secara sederhana dapat ditunjukkan dalam kurva sebagai berikut

Gambar 4 :

Penentuan Nilai Tukar Dalam Sistem Kurs Mengambang



Sumber : Manurung, Mandala, 2004, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (kajian Konstektual Indonesia), Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, halaman 74.

3. Sistem kurs mengambang terkendali.

Sistem kurs mengambang terkendali (managed floating system) adalah sebuah sistem dimana penguasaan moneter campur tangan dalam pasar mata uang asing untuk memerlukan fluktuasi jangka pendek atau tanpa mempengaruhi arah jangka panjang dalam nilai tukar. (Manurung, 2004 : 74)

2.2.9.3 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tukar Mata Uang.

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi nilai mata uang antara mata uang satu dengan mata uang lainnya atau negara lain : (Manurung, 2004 : 75-76)

1. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana senantiasa terjadi peningkatan harga-harga secara umum, atau suatu keadaan dimana senantiasa terjadi penurunan nilai mata uang, karena semakin meningkatnya jumlah uang, karena semakin meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat.

2. Tingkat Bunga

Apabila tingkat bunga dalam negeri lebih tinggi dari tingkat bunga luar negeri akan mengakibatkan aktiva dalam negeri lebih menarik bagi penanam modal bagi dari dalam maupun luar negeri,

sehingga akan menyebabkan terjadinya pemasukan modal yang cenderung menimbulkan apresiasi dalam nilai tukar mata uang dalam negeri.

3. Tingkat Pendapatan

Bila pendapatan riil masyarakat dalam negeri meningkat, maka permintaan akan barang-barang impor akan meningkat, yang berarti peningkatan permintaan valuta asing. hal ini akan mengakibatkan nilai tukar mata uang asing mengalami peningkatan, dan mata uang dalam negeri akan mengalami depresiasi.

4. Faktor Spekulasi

Spekulasi adalah kegiatan membeli atau menjual mata uang asing dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penurunan atau peningkatan dalam nilai mata uang dalam negeri.

2.2.9.4 Sistem Kurs yang Berubah-ubah

Didalam pasar bebas perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan transaksi pembayaran keluar negeri (impor). permintaan valuta asing di tentukan dari transaksi debit dalam neraca. pembayaran internasional, sedangkan penawaran valuta asing berasal dari eksportir, yakni berasal dari transaksi kredit neraca pembayaran internasional. suatu mata uang

dikatakan kuat apabila transaksi autonomus debet (surplus neraca pembayaran) sebaliknya di katakan lemah apabila neraca pembayarannya mengalami defisit.

2.2.9.5 Sistem Kurs yang Stabil

Sistem kurs bebas sering menimbulkan adanya tindakan spekulasi sebagai akibat ketidaktentuan di dalam kurs valuta asing, oleh karena itu

1. Aktif : pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilitas kurs.
2. Pasif : suatu negara yang menggunakan sistem standartemas.

2.2.9.6 Perubahan–Perubahan Kurs Valuta Asing

Apabila kurs valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar maka kurs tersebut akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan dalam kurs pertukaran : (Salvator, 2004 : 74)

1. Perubahan dalam citarasa masyarakat.

Perubahan ini mempengaruhi permintaan. Apabila penduduk suatu negara semakin lebih menyukai barang–barang dari suatu negara lain, maka permintaan ke atas mata uang negara lain tersebut bertambah. Maka perubahan seperti itu mempengaruhi kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara lain tersebut.

2. Perubahan harga dari barang–barang ekspor.

Apabila barang–barang ekspor mengalami perubahan maka perubahan ini akan mempengaruhi permintaan ke atas barang ekspor itu. perubahan ini akan mempengaruhi kurs valuta asing. Kenaikan harga barang–barang ekspor akan mengurangi permintaan ke atas barang tersebut di luar negeri. maka kenaikan tersebut akan mengurangi penawaran mata uang asing.

3. Kenaikan harga–harga umum (inflasi).

Berlakunya keadaan demikian di suatu negara dapat menurunkan nilai mata uangnya. disatu pihak kenaikan harga–harga itu akan menyebabkan penduduk negara itu semakin banyak mengimpor dari negara lain. Oleh karenanya permintaan atas valuta asing bertambah mahal dan ini akan mengurangi permintaanya dan selanjutnya akan menurunkan penawaran valuta asing.

4. Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian Investasi.

Disamping dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran ke atas barang–barang yang dipedagangkan diantara berbagai negara, kurs valuta asing dipengaruhi pula oleh aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta aliran modal jangka

panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut.

5. Perkembangan ekonomi

Bentuk dari pengaruh perkembangan ekonomi kepada kurs valuta asing tergantung kepada corak dari perkembangan ekonomi. Semakin membaiknya perekonomian di suatu negara, berarti kurs dalam negeri akan menguat. Dengan menguatnya nilai tukar mata uang domestik, maka nilai tukar valuta asing akan rendah.

Kerangka Pikir

Kerangka pikir dari penelitian ini membahas “Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap (DPK) Pada Bank Umum dan Bank Syariah”, dalam pembahasan ini variabel yang mempengaruhi yaitu inflasi, kurs Rupiah terhadap US \$, dan suku bunga SBI. Untuk mengetahui keterkaitan hubungan antar variabel maka dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

1. Inflasi (X_1) SBI Y_1

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. (Putong, 2003 : 254). Dengan menurunnya inflasi maka harga-harga barang akan tergolong murah. Untuk memproduksi suatu barang akan cenderung lebih rendah nilainya sehingga dengan biaya produksi yang rendah maka keuntungan yang diperoleh dari omset penjualan juga

semakin besar. Hal ini akan berakibat pada peningkatan produktifitas barang dan jasa sehingga jumlah tenaga kerja yang diserap meningkat, yang akan diikuti oleh meningkatnya pendapatan riil. Dengan meningkatnya pendapatan riil, keinginan masyarakat untuk menyimpan sebagian pendapatannya pada bank, baik bank umum maupun bank syariah akan meningkat pula. Sebaliknya, jika inflasi mengalami kenaikan, maka harga barang-barang akan mengalami kenaikan, yang berdampak pada menurunnya produktifitas. Dari hal tersebut berhubungan dengan pendapatan riil masyarakat yang juga akan menurun. (Rivai, 2006 : 32)

2. Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2)

Kurs adalah jumlah atau harga mata uang domestik dari mata uang luar negeri (asing) atau ratio antara satu unit satuan mata uang dengan jumlah mata uang yang lain pada waktu tertentu. (Salvatore, 2004 : 140) Dalam penelitian ini kurs Rupiah terhadap US \$ akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Jika nilai tukar mata uang US \$ rendah maka harga-harga barang dalam negeri akan stabil, yang berakibat baik pada perekonomian dalam negeri, dan itu berarti kurs Rupiah terhadap US \$ menguat. Hal tersebut akan berdampak pada simpanan masyarakat pada bank umum maupun syariah yang juga akan meningkat. (Rivai, 2006 : 34)

3. Suku Bunga SBI (X_3)

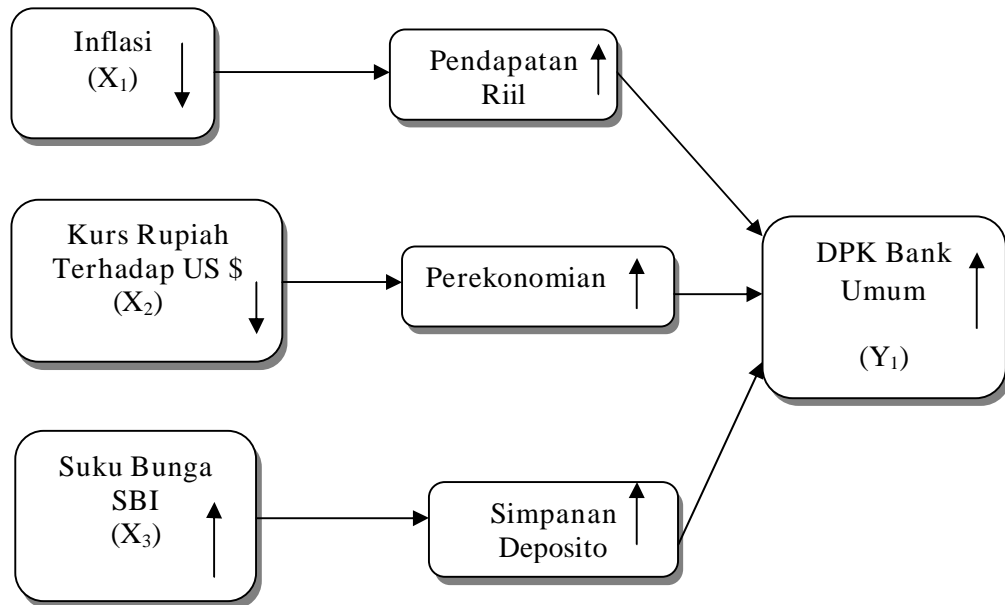
Suku bunga adalah tingkat balas jasa yang diperoleh masyarakat yang menginvestasikan dananya pada pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). (Manurung, 2004 : 112)

Apabila tingkat suku bunga SBI naik, maka suku bunga yang diberikan oleh bank juga akan mengalami kenaikan. Kecenderungan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank akan meningkat, khususnya pada simpanan deposito bank umum. Tetapi berbeda dengan simpanan pada bank syariah yang akan menurun karena dampak dari meningkatnya simpanan pada bank umum tersebut. Jika tingkat suku bunga SBI yang diberikan rendah, maka masyarakat akan cenderung untuk menginvestasikan dananya pada bidang lain selain perbankan. (Iqbal, 2001 : 33)

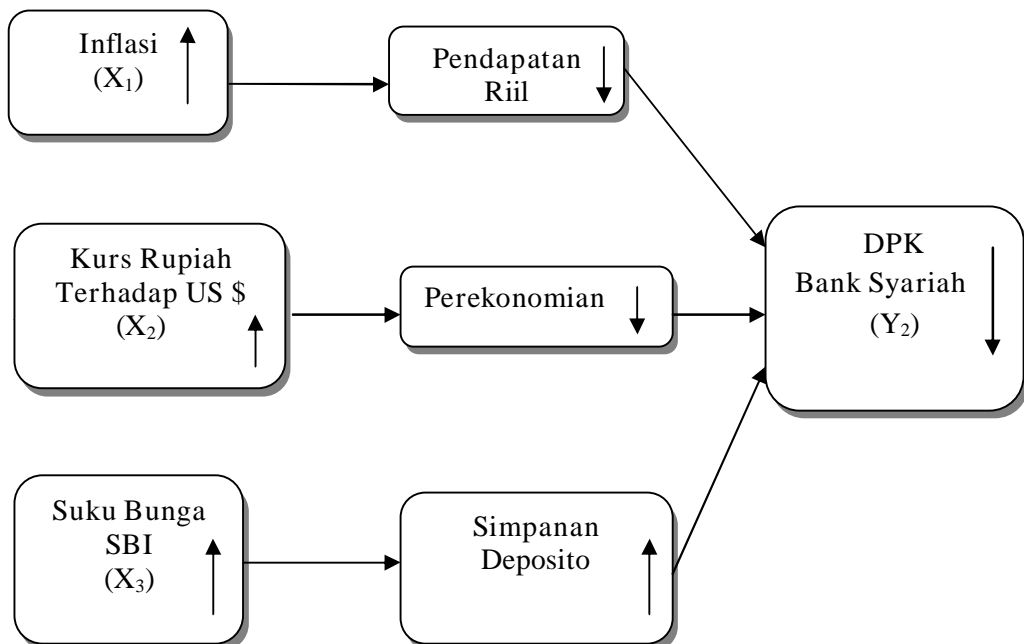
Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya dan teori-teori yang melandasinya, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir untuk memecahkan masalah tersebut seperti pada gambar berikut (Rivai, 2006 : 35)

Gambar 5 : Kerangka Pikir

✓ Bank Umum



✓ Bank Syariah



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih belum teruji kebenarannya dan masih harus dibuktikan secara empiris berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hipotesis akan ditolak jika memang salah atau diterima jika fakta-fakta membenarkan. Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga tingkat inflasi, kurs Rupiah terhadap US \$, dan tingkat suku SBI mempunyai pengaruh yang nyata terhadap dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah.
2. Diduga dari ketiga faktor makro ekonomi tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah adalah inflasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel adalah pernyataan tentang definisi dan pengukuran variabel “penelitian secara operasional berdasarkan teori yang ada maupun pengalaman empiris.”

Sedangkan definisi pengukuran variabel yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, antara lain terdiri dari :

a. Variabel terikat (Dependent Variable) :

1. DPK Bank Umum (Y_1)

Yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum adalah besarnya dana masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank umum dalam bentuk giro, deposito, tabungan. Dalam variabel ini dinyatakan dalam Miliar Rupiah.

DPK Bank Syariah (Y_2)

Yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah adalah besarnya dana masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank syariah dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam variabel ini dinyatakan dalam Miliar Rupiah.

b. Variabel bebas (Independent variable) terdiri dari :

1. Inflasi (X_1)

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus menerus, laju inflasi ditentukan oleh pertambahan jumlah uang beredar dan mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang. Dalam penelitian ini inflasi dinyatakan dalam bentuk persen.

2. Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2)

Kurs atau nilai tukar Rupiah terhadap US \$ adalah jumlah atau harga mata uang Rupiah dari mata uang US \$ pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini kurs Rupiah terhadap US \$ dinyatakan dalam bentuk Rupiah.

3. Suku Bunga SBI (X_3)

Tingkat balas jasa yang diperoleh masyarakat penyimpan dana di bank karena menyimpan sejumlah dana yang dimilikinya. Dalam penelitian ini suku bunga SBI dinyatakan dalam bentuk persen.

3.2 Teknik Penentuan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah secara time series, yaitu data berkala dalam periode triwulan selama tiga tahun dari tahun 2009 sampai dengan 2011.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bisa dikumpulkan atau diperoleh dari instansi yang ada hubungannya dengan penelitian ini atau data yang sudah terlampir dan bisa diambil dari instansi yang bersangkutan.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur
- b. Bank Indonesia cabang Surabaya

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Study kepustakaan (Library Research)

Data yang diperoleh berdasarkan buku-buku atau literatur-literatur yang sesuai dengan usaha penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Yaitu memperoleh data dan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan cara mengambil data statistik dari laporan – laporan dari instansi atau lembaga yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3.5 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

3.5.1 Teknik Analisis

Sesuai dengan tujuan dari usulan penelitian ini, maka digunakan suatu model regresi linier berganda. Analisis regresi merupakan alat analisis yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Bentuk model tersebut adalah :

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots \dots (\text{Soelistyo, 2001 : 320})$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots \dots (\text{Soelistyo, 2001 : 320})$$

Dimana :

Y_1 = dana pihak ketiga bank umum

Y_2 = dana pihak ketiga bank syariah

X_1 = tingkat inflasi

X_2 = kurs Rupiah terhadap US \$

X_3 = tingkat suku bunga SBI

α_0 = Konstanta

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = Koefisien regresi

μ_i = Variabel pengganggu, merupakan wakil dari semua faktor lain yang dapat mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tidak dimasukkan dalam model karena diasumsikan sama dengan nol.

Sedangkan untuk mengetahui model analisis tersebut cukup layak digunakan dalam pembuktian selanjutnya dan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat, maka perlu diketahui nilai-nilai koefisien determinasi dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{\text{JK regresi}}{\text{JK total}} \dots\dots\dots(\text{Soelistyo, 2001 : 325})$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

JK = Jumlah kuadrat

JK Regresi = $b_1 y_i X_1 + b_2 y_i X_2 + b_3 y_i X_3 + \dots\dots\dots b_n y_i X_n$

JK total = y_i^2 atau $\frac{y_i - (\bar{y})^2}{n}$

Jadi :

$$R^2 = \frac{b_1 y_i X_1 + b_2 y_i X_2 + b_3 y_i X_3}{y_i^2} \dots\dots\dots(\text{Soelistyo, 2001 : 325})$$

Karakteristik utama dari R^2 adalah :

1. Tidak mempunyai nilai negatif
2. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Dimana kecocokan model dikatakan “lebih baik” jika R^2 semakin dekat dengan 1.
3. Salah satu sifat penting dari R^2 adalah bahwa nilai tadi merupakan fungsi yang tidak pernah menurun (noncreasing function) dari banyaknya variabel yang menjelaskan yang ada dalam model seiring dengan meningkatnya jumlah variabel yang menjelaskan, R^2 hampir-hampir selalu meningkat dan tak pernah menurun.
(Soelistyo, 2001 : 325)

3.5.2 Uji Hipotesis

Selanjutnya untuk menguji hipotesisnya menggunakan cara sebagai berikut :

a. Uji F (secara simultan)

Untuk menguji hubungan regresi antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), maka digunakan uji F.

Pengujian ini ditentukan dengan rumus :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{KT regresi}}{\text{KT Galat}} \dots\dots\dots (\text{Soelistyo, 2001 : 325})$$

Dengan derajat bebas = (k, n-k-1)

Keterangan :

K = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

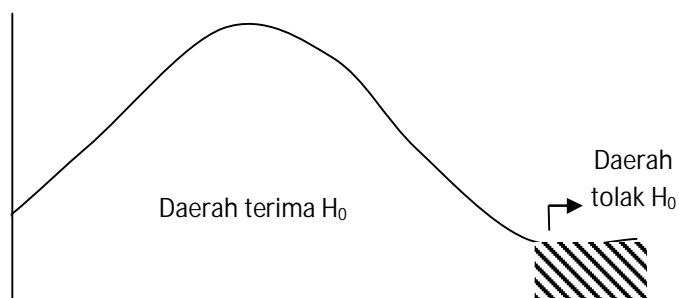
KT = Kuadrat tengah

Galat = Error (Residual)

Kriteria uji F akan ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 6

Kurva Uji Hipotesis Secara Simultan



Sumber : Soelistyo, 2001, “Dasar-Dasar Ekonometrika”, BPFE UGM, Yogyakarta, Halaman 325.

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0 \text{ (tidak ada pengaruh)}$$

$$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 \neq 0 \text{ (ada pengaruh)}$$

Kaidah keputusannya adalah :

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak

b. Uji t

Digunakan untuk menguji hubungan regresi secara terpisah dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan persamaan sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)} \dots\dots\dots (Soelistyo, 2001 : 328)$$

$$\text{Derajat bebas} = (n-k-1)$$

Dimana :

β_i = Koefisien regresi

Se = Standar error

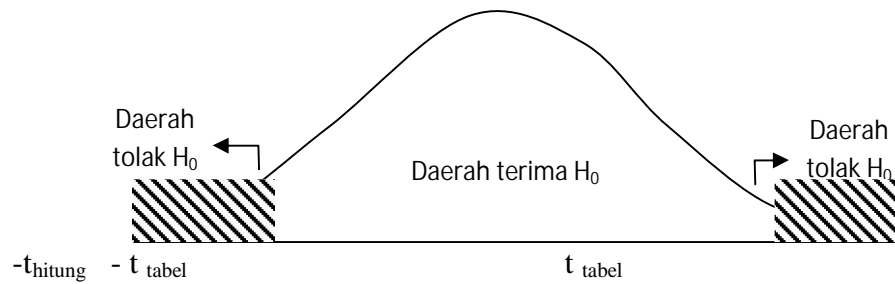
n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

Kriteria uji t akan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 7

Kurva Uji Hipotesis Secara Parsial



Sumber : Soelistyo, 2001, “Dasar-Dasar Ekonometrika”, BPFE
UGM, Yogyakarta, Halaman 328.

$H_0 : \beta_i = 0$ (tidak ada pengaruh nyata)

$H_i : \beta_i \neq 0$ (ada pengaruh nyata)

Kaidah keputusannya adalah :

1. H_0 diterima jika $-t_{hitung} > -t_{tabel}$, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. H_0 ditolak jika $-t_{tabel} < -t_{hitung} < -t_{tabel}$, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.6 Uji Asumsi` Klasik (BLUE)

Persamaan regresi yang dipergunakan haruslah bersifat BLUE, yang artinya pengambilan melalui uji F atau uji t tidak boleh bias. Untuk melaksanakan operasi linier tersebut diperlukan 3 (tiga) asumsi dasar yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar, yaitu :

1. Tidak terjadi korelasi
2. Tidak terjadi multikolinieritas
3. Tidak terjadi heteroskedastisitas

Apabila ada salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimator). sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias. Sifat dari BLUE itu sendiri adalah :

- a. Best : Pentingnya sifat ini bila diterapkan dalam uji signifikan data terhadap α dan β serta membuat interval keyakinan taksiran-taksiran.
- b. Linier : Sifat ini dibutuhkan untuk memudahkan dalam penafsiran.
- c. Unbiased : Nilai jumlah sampel sangat besar penaksir parameter diperoleh dari sampel besar kira-kira lebih mendekati nilai parameter sebenarnya.
- d. Estimate : e (kesalahan) penaksiran linier kuadrat terkecil, artinya diharapkan sekecil mungkin.

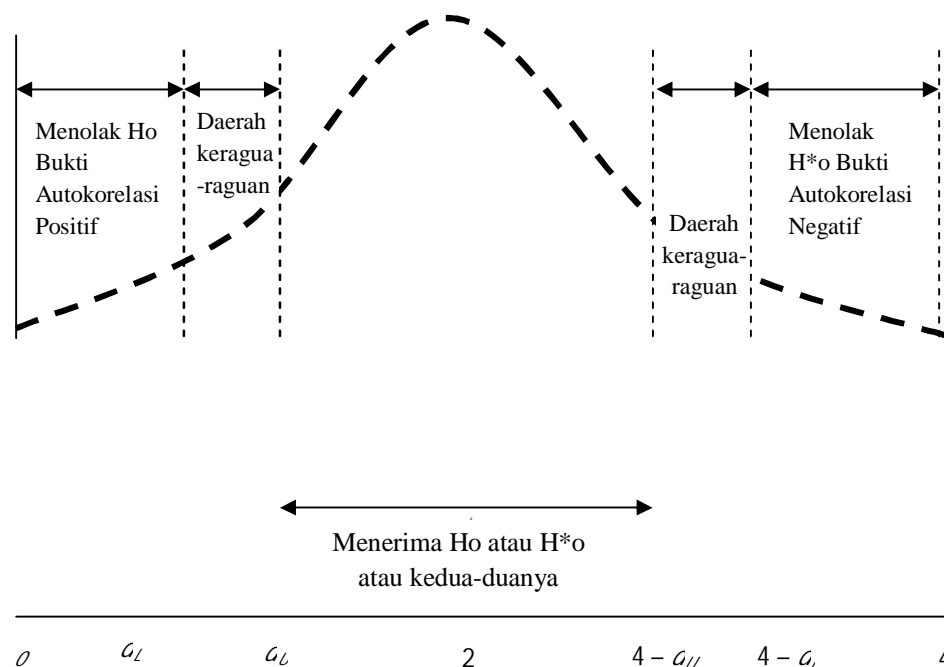
Tiga dari asumsi dasar tersebut yang tidak boleh dilanggar dalam regresi linier berganda :

1. Autokorelasi

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai “korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan urutan waktu (data time series) atau data yang diambil pada waktu tertentu (data cross-sectional). Jadi, dalam model regresi linier diasumsikan tidak terdapat gejala autokorelasi. Artinya, nilai residual (Y observasi – Y prediksi) pada waktu ke- t (e_t) tidak boleh ada hubungan dengan nilai residual periode sebelumnya (e_{t-1}). (Soelistyo, 2001 : 332)

Identifikasi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan kurva dibawah ini :

Gambar 8: Kurva Durbin-Watson



Sumber : Soelistyo, 2001, “Dasar-Dasar Ekonometrika”, BPFE UGM, Yogyakarta, Halaman 332.

Adanya autokorelasi didasarkan atas :

1. Daerah A : Durbin Watson $< d_L$, tolak H_0 autokorelasipositif.
2. Daerah B : $d_L < \text{Durbin Watson} < d_U$, ragu-ragu.
3. Daerah C : $d_U < \text{Durbin Watson} < 4 - d_U$, terima H_0 , non autokorelasi.
4. Daerah D : $4 - d_U < \text{Durbin Watson} < 4 - d_L$, ragu-ragu.
5. Daerah E: Durbin Watson $< 4 - d_L$, tolak H_0 autokorelasi negatif.

Pendekteksian adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan besaran Durbin Watson. Panduan mengenai angka D – W (Durbin Watson) untuk mendeteksi autokorelasi adalah:

1. Angka D – W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D – W dibawah -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D – W diatas +2, berarti ada korelasi negatif.

Tabel 1 : Autokorelasi Durbin Watson

Durbin Watson	Kesimpulan
Kurang dari 1,08	Ada autokorelasi
1,08 – 1,66	Tanpa kesimpulan
1,66 – 2,34	Tidak ada autokorelasi
2,34 – 2,92	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,92	Ada autokorelasi

Sumber : Algifari, 2000. Analisis Regresi, Teori, Kasus dan Solusi,Penerbit : BPFE UGM, Yogyakarta, Halaman 89.

1. Multikolinieritas

Persamaan regresi linier berganda diatas diasumsikan tidak terjadi pengaruh antar variabel bebas. Apabila ternyata ada pengaruh linier antar variabel bebas, maka asumsi tersebut tidak berlaku lagi (terjadi bias).

Untuk mendeteksi adanya multikolieritas dapat dilihat ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Koefisien determinasi berganda (R square) tinggi
- b. Koefisien korelasi sederhana tinggi
- c. Nilai F_{hitung} tinggi (signifikan)
- d. Tapi tak satupun (atau sedikit sekali) diantara variabel bebas yang signifikan.

Akibat adanya multikolinieritas adalah :

1. Nilai standar error (galat baku) tinggi, sehingga taraf kepercayaan (confidence intervalnya) akan semakin melebar. Dengan demikian, pengujian terhadap koefisien regresi secara individu menjadi tidak signifikan.
2. Probabilitas untuk menerima hipotesa H_0 diterima (tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat) akan semakin besar.

Identifikasi secara statistik atau tidaknya gejala multikolinier dapat dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF).

$$VIF = \frac{1}{\text{tolerance}}$$

VIF menyatakan tingkat “pembengkakan” varians. Apabila VIF lebih besar dari 10, hal ini berarti terdapat multikolinier pada persamaan regresi linier. (Soelistyo, 2001 : 335)

3. Heteroskedastisitas

Pada regresi linier residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel X. Hal ini bisa diidentifikasi dengan cara menghitung korelasi Rank Speaman antara residual dengan seluruh variabel bebas. Rumus Rank Spearman adalah :

$$\left| \frac{\sum d_i^2}{N(N^2 - 1)} \right| \dots\dots\dots (\text{Soelistyo, 2001 : 334})$$

Keterangan :

D_i = Perbedaan dalam Rank antara residual dengan variabel bebas ke-1

N = Banyaknya data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Perbankan Nasional

Kondisi dunia perbankan di Indonesia telah mengalami banyak perubahan ini selain disebabkan oleh perkembangan internal dunia perbankan, juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan diluar perbankan seperti sector riil dalam perekonomian, politik, hukum dan social.

Lembaga perbankan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dapat berhasil dengan baik apabila ada lembaga mediator antara pemilik dan pengguna dana melalui lembaga keuangan bank. Salah satu cara memperkecil jarak tersebut adalah dengan memperluas dan menyebarkan lembaga keuangan tersebut kesegala lapisan masyarakat.

Untuk mempercepat pencapaian sasaran dan harapan terhadap perbankan dapat tercapai, maka perlu diciptakan suatu kondisi yang memungkinkan perbankan dapat melakukan upaya yang maksimal agar misi yang dibebankan tersebut dapat terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang mendorong perbankan untuk dengan mudah dapat

melakukan perluasan usaha, kebijaksanaan moneter yang mendukung hal tersebut . (Anonim, 2008 : 10-14)

Sedangkan perkembangan faktor – faktor internal dan eksternal perbankan tersebut menyebabkan kondisi perbankan di Indonesia secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga periode, antara lain :

- a. Kondisi perbankan di Indonesia sebelum diregulasi (sebelum serangkaian paket – paket deregulasi di sector riil dan moneter yang dimulai sejak tahun 1980 an). Perbankan pada masa ini sangat kuat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan ekonomi dan politik dari penguasa yang dalam hal ini adalah pemerintah.
- b. Kondisi perbankan di Indonesia sesudah deregulasi (setelah munculnya deregulasi sampai dengan masa sebelum terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1990-an). Inflansi yang tinggi serta kondisi ekonomi makro secara umum yang tidak bagus terjadi secara bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana yang baik. Fenomena yang terjadi pada masa sebelum deregulasi tersebut, seolah – olah lingkaran yang tidak ada ujung pangkalnya serta saling mempengaruhi. Untuk mengatasinya cara yang ditempuh pemerintah melakukan serangkaian kebijakan berupa deregulasi disektor riil dan moneter. Pada tahun awal, deregulasi lebih cepat dampaknya pada sector moneter melalui serangkaian perubahan di dunia perbankan. Meskipun istilah yang digunakan adalah “deregulasi”. Namun tidak berarti bahwa perubahan

yang dilakukan sepenuhnya berupa pengurangan pembatasan atau pengaturan di dunia perbankan. Perubahan yang terjadi termasuk peningkatan pengaturan pada bidang tertentu, sehingga deregulasi ini lebih cepat untuk diartikan sebagaiperubahan – perubahan yang dimotori oleh otoritas moneter untuk meningkatkan kinerja dunia perbankan dan pada akhirnya juga diharapkan akan meningkatkan kinerja sektor riil.

- c. Kondisi perbankan di Indonesia saat krisis ekonomi mulai akhir tahun 1997-an. Deregulasi dan penerapan kebijakan – kebijakan lain yang terkait dengan sektor perbankan lebih mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kemampuan kinerja ekonomi makro di Indonesia. Mobilisasi dana melalui perbankan menjadi lebih besar dan perbankan menjadi lebih besar peran sertanya dalam menunjang kegiatan di sektor riil melalui peningkatan produksi barang dan jasa. Perkembangan perbankan yang cukup pesat pada masa setelah deregulasi ternyata berlangsung tidak cukup lama untuk dapat mengangkat Indonesia di Asia Tenggara. Perkembangan ini dalam waktu yang sangat singkat menjadi terhenti dan bahkan mengalami kemunduran total akibat adanya krisis moneter yang terjadi pada akhir tahun 1997-an. Krisis ekonomi yang awalnya hanya dipandang sebagai krisis moneter ini banyak menyebabkan perubahan dalam kondisi perbankan di Indonesia. (Anonim, 2008 : 14-20)

4.1.2. Perbankan Syariah

Sejarah berdirinya perbankan dengan sistem bagi hasil, didasarkan pada dua alasan utama yaitu (1) adanya pandangan bahwa bunga (interest) pada bank konvensional hukumnya haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama, bukan saja oleh Agama Islam tetapi juga oleh agama samawi lainnya, (2) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Dalam jangka panjang sistem perbankan konvensional akan menyebabkan penumpukan kekayaan pada segelintir orang yang memiliki kapital besar.

Sebenarnya prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan telah dikenal luas baik di negara Islam maupun non Islam. Jadi bank syariah tidak berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan (Islam) tapi lebih merupakan konsep pembagian hasil usaha antara pemilik modal dengan pihak pengelola modal. Dengan demikian pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh masyarakat yang berminat tidak terbatas pada masyarakat Islam, walaupun tidak dipungkiri sampai saat ini bank syariah di Indonesia baru berkembang pada kalangan masyarakat Islam. Dilihat dari aspek ini, peluang pengembangan bank syariah di Indonesia cukup besar, karena Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk muslim paling besar.

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah dikembangkan sejak Tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga Bank Indonesia dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank - bank syariah.

Perkembangan usaha perbankan syariah di Indonesia merupakan realisasi atas kebutuhan masyarakat akan sistem perbankan alternatif yang dapat memberikan layanan perbankan yang aman dan sesuai dengan peraturan syariah. Perbankan syariah terus mengalami pertumbuhan, ini terbukti dengan adanya pertumbuhan seperti asset, dan dana pada perbankan syariah.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia Cabang Surabaya, menutup tahun 2007 total asset bank umum syariah tercatat Rp. 36,5 Triliun, meningkat 36,7 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan dana yang berhasil di himpun oleh bank umum syariah sebesar Rp. 28,1 Triliun. Dana yang dihimpun tersebut berasal dari deposito mudharabah sebesar Rp. 14,8 Miliar, dari tabungan (mudharabah) sebesar Rp. 9,5 Miliar, sedangkan sisanya berasal dari giro sebesar Rp. 3,7 Miliar.

(Anonim, 2008 : 85-87)

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang data- data serta perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah sehingga dapat mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi terhadap perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, Kurs Rupiah terhadap US \$, dan Suku bunga SBI.

4.2.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2009-2011

Tahun		DPK (Miliar Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	I	933.415	-
	II	984.483	5,47
	III	1.022.316	3,84
	IV	1.096.939	7,30
2010	I	1.101.362	0,40
	II	1.135.913	3,14
	III	1.175.232	3,46
	IV	1.289.630	9,73
2011	I	1.235.201	-1,3072
	II	1.299.351	5,19
	III	1.350.763	3,96
	IV	1.465.844	8,51

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama 3 tahun (2009-2011) dalam triwulan cenderung mengalami fluktuasi. Perkembangan DPK tertinggi adalah pada tahun 2010 triwulan ke IV sebesar 9,73% dan perkembangan DPK terendah adalah pada tahun 2011 triwulan ke I sebesar -1,3072%. DPK tertinggi terjadi pada tahun 2011 triwulan ke IV sebesar Rp. 1.465.844,- dan DPK terendah pada tahun 2009 triwulan ke I sebesar Rp. 933.415,-.

4.2.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2009-2011

Tahun		DPK (Miliar Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	I	14.956	-
	II	16.433	9,94
	III	17.976	9,39
	IV	20.672	15,02
2010	I	21.883	5,86
	II	22.714	3,80
	III	24.680	8,65
	IV	28.012	13,50
2011	I	29.552	5,50
	II	33.049	11,83
	III	33.569	1,57
	IV	36.852	9,78

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama 3 tahun (2009 - 2011) dalam triwulan cenderung mengalami fluktuasi. Perkembangan DPK tertinggi adalah pada tahun 2009 triwulan ke IV sebesar 15,02 % dan perkembangan DPK terendah adalah pada tahun 2011 triwulan ke III sebesar 1,57%. DPK tertinggi terjadi pada tahun 2011 triwulan ke IV sebesar Rp. 36.852,- dan DPK terendah pada tahun 2009 triwulan ke I sebesar Rp. 14.956,-.

4.2.3. Perkembangan Tingkat Inflasi

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa perkembangan tingkat inflasi setiap triwulannya mengalami naik turun yang tidak tentu besarnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 yang menjelaskan bahwa pada tahun 2009 sampai 2011 dalam triwulan, perkembangan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2010 triwulan ke II sebesar 1,11% dan terendah sebesar -1,24% terjadi pada tahun 2011 triwulan ke I. Tingkat inflasi terbesar pada tahun 2010 triwulan ke II sebesar 0,97% dan tingkat inflasi yang terendah yaitu pada tahun 2009 triwulan ke II sebesar 0,11%.

Tabel 4. Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2009 - 2011

Tahun		Tingkat Inflasi (%)	Perkembangan (%)
2009	I	0,22	-
	II	0,11	- 0,11
	III	0,54	0,43
	IV	0,33	- 0,72
2010	I	- 0,14	- 0,47
	II	0,97	1,11
	III	0,44	- 0,53
	IV	0,92	0,48
2011	I	- 0,32	- 1,24
	II	0,55	0,87
	III	0,27	- 0,28
	IV	0,57	0,30

Sumber : Balai Pusat Statistik Surabaya (diolah)

4.2.4. Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap US \$

Berdasarkan tabel dibawah dapat diketahui bahwa perkembangan kurs Rupiah terhadap US \$ selama 3 tahun (2009 - 2011) dalam triwulan cenderung mengalami fluktuasi. Perkembangan tertinggi selama periode penelitian adalah pada tahun 2011 triwulan ke IV sebesar 2,77 % dengan kurs Rupiah mencapai Rp. 9.023,-. Sedangkan perkembangan terendah adalah pada tahun 2009 triwulan ke II sebesar -11,66%, dan kurs Rupiah terendah pada tahun 2011 triwulan ke II sebesar Rp. 8554,-.

Tabel 5. Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap US \$ Tahun 2009-2011

Tahun		Kurs Rp / US \$ (Rupiah)	Perkembangan (%)
2009	I	11517	-
	II	10174	- 11,66
	III	9633	- 5,31
	IV	9353	- 2,90
2010	I	9069	- 3,03
	II	9038	- 0,34
	III	8879	- 1,75
	IV	8946	0,75
2011	I	8665	- 3,14
	II	8554	- 1,28
	III	8779	2,63
	IV	9023	2,77

Sumber : Balai Pusat Statistik Surabaya (diolah)

4.2.5. Perkembangan Suku Bunga SBI

Berdasarkan tabel di bawah ini, dapat dijelaskan bahwa perkembangan suku bunga SBI setiap triwulannya mengalami naik turun yang tidak tentu besarnya, dan ada juga yang mengalami ketetapan besarnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 6 yang menjelaskan bahwa pada tahun 2009 sampai 2011 dalam triwulan, perkembangan tingkat suku bunga SBI tertinggi pada tahun 2009 triwulan ke II sebesar 7,85% dan terendah sebesar -21,87% terjadi pada tahun 2009 triwulan ke IV. Tingkat suku bunga SBI terbesar pada tahun 2009 triwulan ke I sebesar 12,73% dan tingkat suku bunga yang terendah yaitu sebesar 6,00% terjadi pada tahun 2011 selama triwulan ke IV.

Tabel 6. Perkembangan Suku Bunga SBI Tahun 2009-2011

Tahun		Suku Bunga SBI (%)	Perkembangan (%)
2009	I	12,73	-
	II	12,16	7,85
	III	12,16	0
	IV	9,50	-21,87
2010	I	8,13	-14,42
	II	7,83	-3,69
	III	7,83	0
	IV	7,83	0
2011	I	6,75	-1.08
	II	6,75	0
	III	6,75	0
	IV	6,00	-0.75

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

4.3 Analisis dan Uji Hipotesis

4.3.1. Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik (BLUE / Best Linier Unbiased Estimator).

Agar dapat diperoleh hasil estimasi yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) atau perkiraan linier tidak bias yang terbaik maka estimasi tersebut harus memenuhi beberapa asumsi yang berkaitan. Apabila salah satu asumsi tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE, sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias. Dalam hal ini harus dihindarkan terjadinya kasus-kasus sebagai berikut :

1. Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai “korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan urutan waktu (data time series) atau data yang diambil pada waktu tertentu (data cross-sectional)”. (Soelistyo, 2001 : 332) Untuk menguji variabel-variabel yang diteliti apakah terjadi autokorelasi atau tidak dapat digunakan uji Durbin Watson, yaitu dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson yang dihitung dengan nilai Durbin Watson (d_L dan d_U) dalam tabel. Distribusi penentuan keputusan dimulai dari 0 (nol) sampai 4 (empat).

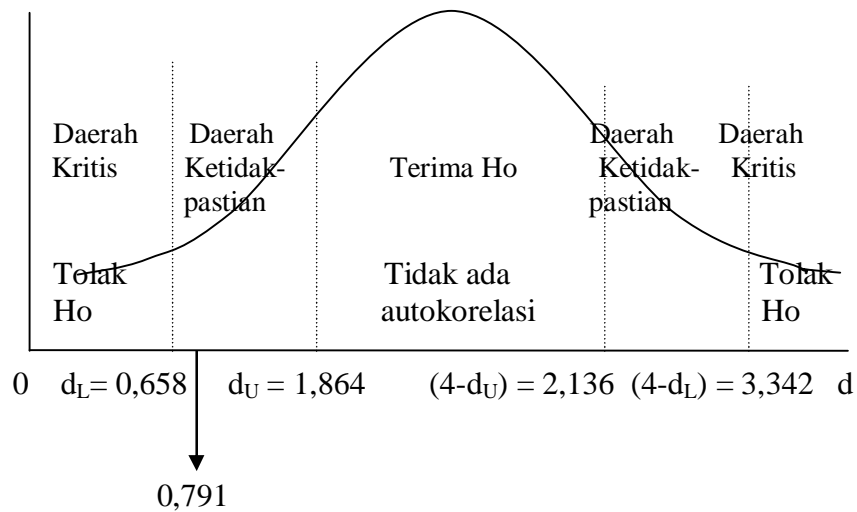
Kaidah keputusan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika d lebih kecil daripada d_L atau lebih besar daripada $(4-d_L)$, maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara d_U dan $(4-d_U)$, maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika nilai d terletak antara d_L dan d_U atau antara $(4-d_L)$ dan $(4-d_U)$ maka uji Durbin-Watson tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, untuk nilai-nilai ini tidak dapat disimpulkan ada tidaknya autokorelasi di antara faktor-faktor pengganggu.

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model I pada penelitian maka perlu dilihat nilai DW tabel. Diketahui jumlah variabel bebas adalah 3 ($k=3$) dan banyaknya data adalah ($n=12$) sehingga diperoleh nilai DW tabel adalah sebesar $d_L = 0,658$ dan $d_U = 1,864$.

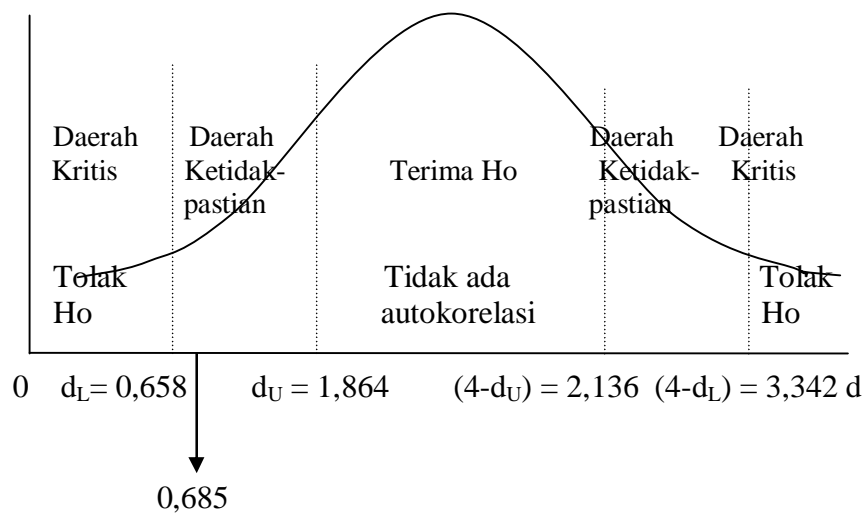
Gambar 9. Kurva Statistik Durbin Watson untuk Dana Pihak

Ketiga (DPK) pada Bank Umum



Gambar 10. Kurva Statistik Durbin Watson untuk Dana Pihak

Ketiga pada Bank Syariah



Sumber : Lampiran 8

Berdasarkan hasil analisis, maka dalam model regresi ini tidak terjadi gejala autokorelasi karena nilai DW tes yang diperoleh adalah untuk model I (Y_1) sebesar 0,791 berada pada daerah antara d_L dan d_U

yang berarti berada dalam daerah ketidakpastian. Sedangkan untuk model II (Y_2) sebesar 0,685 berada pada daerah antara d_L dan d_U yang berarti berada dalam daerah ketidakpastian, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis regresi untuk dua persamaan terbebas dari uji autokorelasi.

2. Multikolinier

Multikolinieritas berarti ada hubungan linier yang “sempurna” atau pasti di antara beberapa atau semua variabel independen dari model regresi.

Dari dugaan adanya multikolinieritas tersebut maka perlu adanya pembuktian secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinier dengan cara menghitung Variance Inflation Factor (VIF). VIF menyatakan tingkat “pembengkakan” varians. Apabila VIF lebih besar dari 10, hal ini berarti terdapat multikolinier pada persamaan regresi linier.

Adapun hasil yang diperoleh setelah diadakan pengujian analisis regresi linier berganda diketahui bahwa dari keempat variabel yang dianalisis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Tes Multikolinier

Variabel	VIF (Y ₁)	VIF (Y ₂)	Ketentuan	Keterangan
Inflasi (X ₁)	1,019	1,019	10	Tidak Terjadi Multikolinier
Kurs Rp / US \$ (X ₂)	3,928	3,928	10	Tidak Terjadi Multikolinier
Sk. Bunga SBI (X ₃)	3,902	3,902	10	Tidak Terjadi Multikolinier

Sumber : Lampiran 3 dan 6 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai VIF semua variabel independent X₁, X₂, dan X₃ dengan variabel dependent masing-masing Y₁ dan Y₂ bernilai kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan dalam persamaan tidak terjadi multikolinearitas pada semua variabel.

3. Heterokedastisitas

Pada regresi linier nilai residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel bebas (X). Hal ini bisa diidentifikasi dengan menghitung korelasi rank spearman antara residual dengan seluruh variabel bebas. Pembuktian adanya heterokedastisitas dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 8. Tes Heterokedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman
Korelasi

Variabel	Tarf signifikansi dari korelasi Rank Spearman		Ketentuan	Keterangan
	Y_1	Y_2		
Inflasi (X_1)	0,716	0,713	$> 0,05$	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Kurs Rp / US \$ (X_2)	0,729	0,557	$> 0,05$	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Sk. Bunga SBI (X_3)	0,340	0,257	$> 0,05$	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber : Lampiran 4 dan 7.

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh tingkat signifikansi koefisien korelasi rank spearman untuk variabel bebas residual lebih besar dari 0,05 (tidak signifikan) sehingga tidak mempunyai korelasi yang berarti antara nilai residual dengan variabel yang menjelaskan. Jadi dapat disimpulkan persamaan tersebut tidak terjadi heterokedastisitas.

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa pada model penelitian ini tidak terjadi pelanggaran asumsi klasik.

4.3.2. Analisis Hasil Perhitungan Koefisien Regresi

Dalam analisis ini digunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji dan untuk mengolah data yang ada dengan menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (Statistic Program For Social Science) versi 13.0.

Pengujian untuk penelitian ini dengan melakukan dua kali pengolahan data. Karena tujuan penelitian ini adalah membandingkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya pada Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum dan Bank Syariah.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

1. Untuk Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum

Persamaan regresi yang dihasilkan:

$$Y_1 = 1466661 + 63984,149 X_1 + 29,510 X_2 - 67889,5 X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut:

α_0 = nilai konstanta sebesar 1466661 menunjukkan bahwa apabila faktor Tingkat Inflasi (X_1), Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2), dan Tingkat Suku Bunga SBI (X_3) konstan, maka Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan naik sebesar Rp. 1.466.661,-.

α_1 = 63984,149. Menunjukkan bahwa faktor Tingkat Inflasi (X_1) berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat

diartikan apabila Tingkat Inflasi mengalami penurunan satu persen maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan meningkat sebesar Rp.63.984,149,-.

$_2 = 29,510$. Menunjukkan bahwa faktor Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2) berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat diartikan apabila Kurs Rupiah terhadap US \$ mengalami kenaikan satu persen maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami kenaikan sebesar Rp. 29,510,-.

$_3 = -67889,5$. Menunjukkan bahwa faktor Tingkat Suku Bunga SBI (X_3) berpengaruh negatif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat diartikan apabila Tingkat Suku Bunga SBI mengalami kenaikan satu persen maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami penurunan sebesar Rp. 67889,5,-.

2. Untuk Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah

Persamaan regresi yang dihasilkan:

$$Y_2 = 39529,909 + 1043,534 X_1 + 1,307 X_2 - 3106,847 X_3$$

Berdasarkan persamaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut:

o = nilai konstanta sebesar 39529,909 menunjukkan bahwa apabila faktor Tingkat Inflasi (X_1), Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2), dan Tingkat Suku Bunga SBI (X_3) konstan, maka Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan naik sebesar Rp. 39529,909,-.

- $t_1 = 1043,534$. Menunjukkan bahwa faktor Tingkat Inflasi (X_1) berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat diartikan apabila Tingkat Inflasi mengalami kenaikan satu persen maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan naik sebesar Rp.1043,534,-.
- $t_2 = 1,307$. Menunjukkan bahwa faktor Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2) berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat diartikan apabila Kurs Rupiah terhadap US \$ mengalami kenaikan satu rupiah maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami kenaikan sebesar Rp 1,307,-.
- $t_3 = -3106,847$. Menunjukkan bahwa faktor Tingkat Suku Bunga SBI (X_3) berpengaruh negatif terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), dapat diartikan apabila Tingkat Suku Bunga SBI mengalami kenaikan satu persen maka Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengalami penurunan sebesar Rp 3106,847,-.

4.3.3. Uji Hipotesis Secara Simultan

Untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan uji F dengan langkah – langkah sebagai berikut:

Tabel 9 : Analisis Varian (ANOVA)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	232245259876	3	77415086625.4	13.326	.002 ^a
	Residual	46473736858.6	8	5809217107.330		
	Total	278718996735	11			

a. Predictors: (Constant), x3=Tngkt Suku Bunga SBI, x1=Tingkat Inflasi, x2=Kurs Valas

b. Dependent Variable: y1=DPK Bank Umum

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	468468743.9	3	156156248.0	12.828	.002 ^a
	Residual	97385548.057	8	12173193.51		
	Total	565854292.0	11			

a. Predictors: (Constant), x3=Tngkt Suku Bunga SBI, x1=Tingkat Inflasi, x2=Kurs Valas

b. Dependent Variable: y2=DPK Bank Syariah

Sumber: Lampiran 3 dan 6

Untuk menguji pengaruh secara simultan (serempak) digunakan uji F dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk Dana Pihak Ketiga Bank Umum (Y_1)

a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

Secara keseluruhan variabel bebas tidak ada pengaruh terhadap variabel terikat.

$H_i : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Secara keseluruhan variabel bebas ada pengaruh terhadap variabel terikat.

b. $\alpha = 0,05$ dengan df pembilang = 3

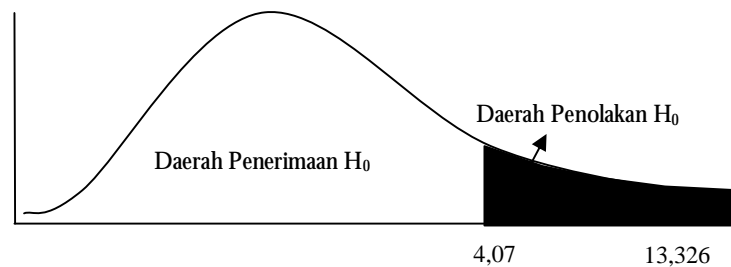
df penyebut = 8

c. $F_{\text{tabel}} (\alpha = 0,05) = 4,07$

$$\begin{aligned} \text{d. } F_{\text{hitung}} &= \frac{\text{Rata - rata kuadrat regresi}}{\text{Rata - rata kuadrat sisa}} \\ &= \frac{77415086625,4}{5809217107,330} = 13,326 \end{aligned}$$

e). Daerah pengujian

Gambar 11.
Distribusi Kriteria Penerimaan/Penolakan Hipotesis
Secara Simultan atau Keseluruhan



H_0 diterima apabila $F_{\text{hitung}} \leq 4,07$

H_0 ditolak apabila $F_{\text{hitung}} > 4,07$

f) . Kesimpulan

Oleh karena $F_{\text{hitung}} = 13,326 > F_{\text{tabel}} = 4,07$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas yaitu Tingkat Inflasi (X_1), Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2), dan Tingkat Suku Bunga SBI (X_3), berpengaruh signifikan dan bersama-sama terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Y_1).

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan atau pengaruh yang diberikan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,833, artinya 83,3% dari seluruh pengamatan menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikatnya, dan sisanya 16,7 % dipengaruhi faktor lain diluar penelitian.

2. Untuk Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (Y_2)

a. $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

Secara keseluruhan variabel bebas tidak ada pengaruh terhadap variabel terikat.

$H_i : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$

Secara keseluruhan variabel bebas ada pengaruh terhadap variabel terikat.

b. $\alpha = 0,05$ dengan df pembilang = 3

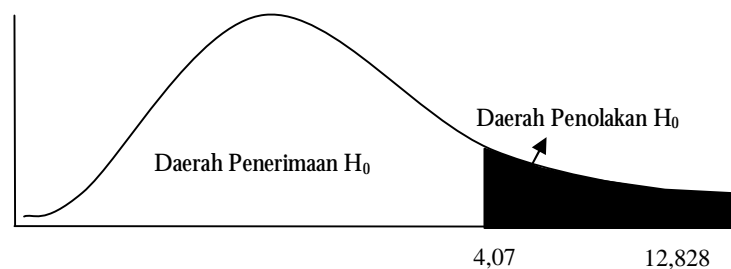
df penyebut = 8

c. F tabel ($\alpha = 0,05$) = 4,07

$$\begin{aligned} \text{d. } F_{\text{hitung}} &= \frac{\text{Rata - rata kuadrat regresi}}{\text{Rata - rata kuadrat sisa}} \\ &= \frac{156156248}{12173193,51} = 12,828 \end{aligned}$$

e). Daerah pengujian

Gambar 12.
Distribusi Kriteria Penerimaan/Penolakan Hipotesis
Secara Simultan atau Keseluruhan



H_0 diterima apabila $F_{hitung} \leq 4,07$

H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > 4,07$

g) . Kesimpulan

Oleh karena $F_{hitung} = 12,828 > F_{tabel} = 4,07$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti bahwa secara keseluruhan faktor-faktor variabel bebas yaitu Tingkat Inflasi (X_1), Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2), dan Tingkat Suku Bunga SBI (X_3), berpengaruh signifikan dan bersama-sama terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) (Y_2).

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan atau pengaruh yang diberikan variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada nilai R^2 (koefisien determinasi) sebesar 0,828, artinya 82,8% dari seluruh pengamatan menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikatnya, dan sisanya 17,2 % dipengaruhi faktor lain diluar penelitian.

4.3.4. Uji Hipotesis Secara Parsial

Analisis ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel bebas Tingkat Inflasi (X_1), Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2), dan Tingkat Suku Bunga SBI (X_3) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum (Y_1) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah (Y_2). Hasil penghitungan tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 10 : Hasil Analisis Variabel X terhadap Y

	Variabel	t hitung	t tabel	r ² Parsial	Kesimpulan
DPK Bank Umum (Y_1)	Inflasi (X_1)	1,054	2,306	0,121	Tidak Signifikan
	Kurs Rp/US\$ (X_2)	0,536	2,306	0,034	Tidak Signifikan
	Sk.Bunga SBI (X_3)	-3,554	2,306	0,611	Signifikan
DPK Bank Syariah (Y_2)	Inflasi (X_1)	0,376	2,306	0,017	Tidak Signifikan
	Kurs Rp/US \$ (X_2)	0,518	2,306	0,032	Tidak Signifikan
	Sk.Bunga SBI (X_3)	-3,553	2,306	0,611	Signifikan

Sumber: Lampiran 3 dan 6

Selanjutnya untuk melihat ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variable terikat, dapat diuji melalui uji t dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum

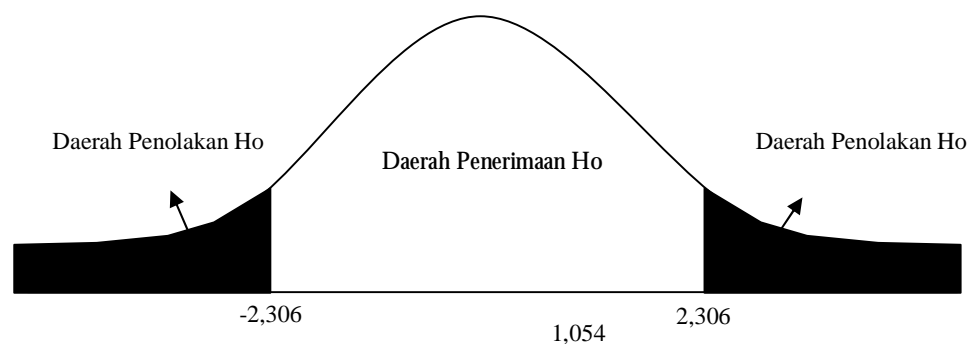
- a) Pengaruh secara parsial antara Tingkat Inflasi (X_1) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum (Y_1)

Langkah-langkah pengujian :

- i. $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh)
- ii. $\alpha = 0,05$ dengan $df = 8$
- iii. $t_{hitung} = \frac{1}{Se(\hat{\beta}_1)} = 1,054$
- iv. level of signficancy = $0,05/2$ ($0,025$) berarti t_{tabel} sebesar $2,306$
- v. pengujian

Gambar 13.

Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Tingkat Inflasi (X_1) terhadap DPK Bank Umum (Y_1)



Sumber : lampiran 4

Berdasarkan perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar $1,054 < t_{tabel}$ sebesar $2,306$ H_0 diterima dan H_1 ditolak pada level

signifikan 5 %, sehingga secara parsial Tingkat Inflasi (X_1) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum (Y_1).

Nilai r^2 parsial untuk variabel Tingkat Inflasi sebesar 0,121, yang artinya bahwa Tingkat Inflasi (X_1) secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum (Y_1) sebesar 12,1 %, sedangkan sisanya 87,9 % dijelaskan oleh variabel lain.

- b) Pengaruh secara parsial antara Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum (Y_1)

Langkah-langkah pengujian :

- i. $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh)

- ii. $\alpha = 0,05$ dengan $df = 8$

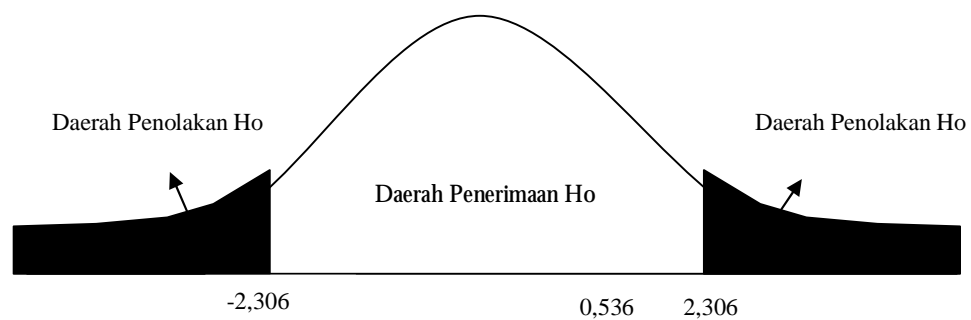
iii. $t_{hitung} = \frac{2}{Se(\hat{\beta}_2)} = 0,536$

- iv. level of significani = $0,05/2$ (0,025) berarti t_{tabel} sebesar 2,306

v. pengujian

Gambar 14.

Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Kurs
Rupiah terhadap US \$ (X_2) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)
Bank Umum (Y_1)



Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar $0,536 < t_{tabel}$ sebesar 2,306 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, pada level signifikan 5 %, sehingga secara parsial Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Dana Pihak ketiga (DPK) pada Bank Umum (Y_1).

Nilai r^2 parsial untuk variabel Kurs Rupiah terhadap US \$ sebesar 0,034 yang artinya bahwa Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2) secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum (Y_1) sebesar 3,4%, sedangkan sisanya 96,6 % dijelaskan oleh variabel lain.

- c) Pengaruh secara parsial antara Suku Bunga SBI (X_3) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum (Y_1)

Langkah-langkah pengujian :

i. $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh)

ii. $\alpha = 0,05$ dengan $df = 8$

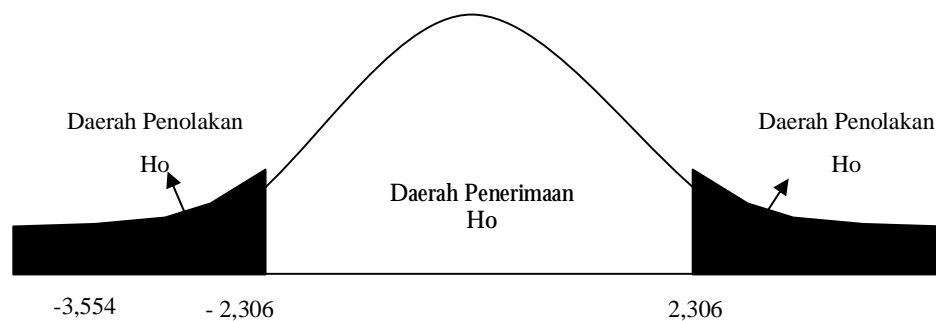
iii. $t_{hitung} = \frac{3}{Se(\beta_1)} = -3,554$

iv. level of significani = $0,05/2$ (0,025) berarti t_{tabel} sebesar 2,306

v. pengujian

Gambar 15.

Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Suku Bunga SBI (X_3) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum (Y_1)



Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar $-3,554 > t_{tabel}$ sebesar $-2,306$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, pada level signifikan 5 %, sehingga secara parsial Suku Bunga SBI (X_3)

berpengaruh secara nyata terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum (Y_1).

Nilai r^2 parsial untuk variabel Investasi sebesar 0,611 yang artinya Suku Bunga SBI (X_3) secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum (Y_1) sebesar 61,1%, sedangkan sisanya 38,9% dijelaskan oleh variabel lain.

2. Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah

- a) Pengaruh secara parsial antara Tingkat Inflasi (X_1) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah (Y_2)

Langkah-langkah pengujian :

vi. $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh)

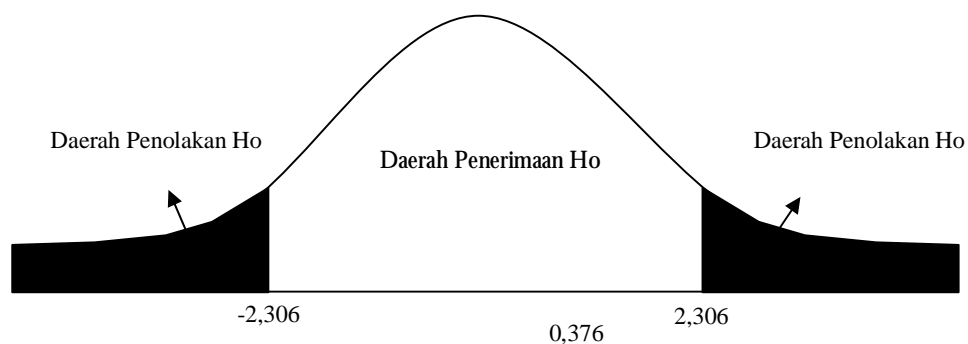
vii. $\alpha = 0,05$ dengan $df = 8$

viii. $t_{hitung} = \frac{1}{Se(\beta_1)} = 0,376$

ix. level of significancy = $0,05/2$ (0,025) berarti t_{tabel} sebesar 2,306

x. pengujian

Gambar 16.
Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Tingkat Inflasi
(X_1) terhadap DPK Bank Syariah (Y_2)



Sumber : lampiran 4

Berdasarkan perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar $0,376 < t_{tabel}$ sebesar 2,306 H_0 diterima dan H_1 ditolak pada level signifikan 5 %, sehingga secara parsial Tingkat Inflasi (X_1) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Syariah (Y_2).

Nilai r^2 parsial untuk variabel Tingkat Inflasi sebesar 0,017, yang artinya bahwa Tingkat Inflasi (X_1) secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah (Y_2) sebesar 1,7%, sedangkan sisanya 98,3% dijelaskan oleh variabel lain.

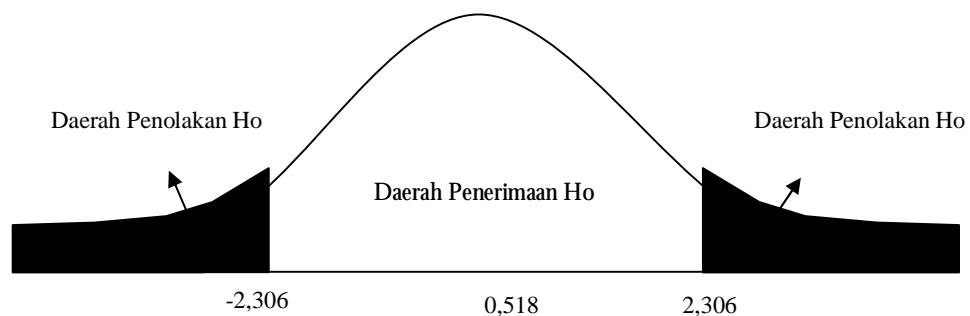
- b) Pengaruh secara parsial antara Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah (Y_2)

Langkah-langkah pengujian :

- vi. $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)
 $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh)
- vii. $\alpha = 0,05$ dengan $df = 8$
- viii. $t_{hitung} = \frac{2}{Se(\beta_2)} = 0,518$
- ix. level of significani = $0,05/2$ (0,025) berarti t_{tabel} sebesar 2,306
- x. pengujian

Gambar 17.

Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Faktor Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah (Y_2)



Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar $0,518 < t_{tabel}$ sebesar 2,306 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, pada level signifikan 5 %, sehingga secara parsial Kurs Rupiah terhadap

US \$ (X_2) tidak berpengaruh secara nyata terhadap Dana Pihak ketiga (DPK) pada Bank Syariah (Y_2).

Nilai r^2 parsial untuk variabel Kurs Rupiah terhadap US \$ sebesar 0,032 yang artinya bahwa Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2) secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah (Y_2) sebesar 3,2%, sedangkan sisanya 86,8% dijelaskan oleh variabel lain.

- c) Pengaruh secara parsial antara Suku Bunga SBI (X_3) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah (Y_2)

Langkah-langkah pengujian :

vi. $H_0 : \beta_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh)

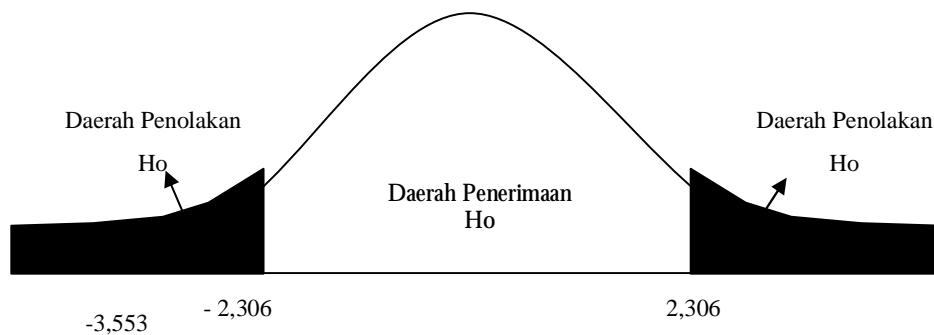
vii. $\alpha = 0,05$ dengan $df = 8$

viii. $t_{hitung} = \frac{3}{Se(\beta_1)} = -3,553$

ix. level of significani = $0,05/2$ (0,025) berarti t_{tabel} sebesar 2,306

x. pengujian

Gambar 18.
Kurva Distribusi Hasil Analisis secara Parsial Suku Bunga SBI (X_3)
terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah (Y_2)



Sumber : Lampiran 4

Berdasarkan perhitungan diperoleh t_{hitung} sebesar $-3,553 > t_{tabel}$ sebesar $-2,306$ maka H_0 ditolak dan H_i diterima, pada level signifikan 5 %, sehingga secara parsial Suku Bunga SBI (X_3) berpengaruh secara nyata terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah (Y_2).

Nilai r^2 parsial untuk variabel Investasi sebesar 0,611 yang artinya Suku Bunga SBI (X_3) secara parsial mampu menjelaskan variabel terikat Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah (Y_2) sebesar 61,1%, sedangkan sisanya 38,9% dijelaskan oleh variabel lain.

4.3.5. Pembahasan

Dengan melihat hasil regresi yang didapat maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum dan Bank Syariah adalah :

a. Pengaruh secara Simultan

Tingkat Inflasi (X_1), Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2), dan Tingkat Suku Bunga SBI (X_3) berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum (Y_1) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah (Y_2).

b. Pengaruh Tingkat Inflasi (X_1) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum (Y_1) dan Bank Syariah (Y_2)

Tingkat Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan (tidak nyata) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum maupun pada Bank Syariah. Hal tersebut disebabkan karena apabila tingkat inflasi turun maka harga – harga barang dan jasa juga akan turun tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi permintaan masyarakat akan barang dan jasa meningkat dikarenakan masih banyaknya kebutuhan yang lain yang lebih penting atau lebih di dahulukan atau banyak masyarakat yang memilih berinvestasi yang lain dan tidak selau menabung di bank sehingga tidak mempengaruhi tabungan di masyarakat.

- c. Pengaruh Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum (Y_1) dan Bank Syariah (Y_2)

Kurs Rupiah terhadap US \$ tidak berpengaruh secara signifikan (tidak nyata) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum maupun pada Bank Syariah. Hal tersebut terjadi karena, naik turunnya kurs Rupiah terhadap US \$ yang bersifat sementara menyebabkan sebagian masyarakat sudah mulai terbiasa dengan keadaan tersebut. Jadi, berfluktuasinya kurs Rupiah terhadap US \$ mempunyai pengaruh yang sedikit terhadap Dana pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum maupun Syariah. Selain itu, adanya motif berjaga-jaga pada masyarakat, maka masyarakat lebih memilih untuk menginvestasikan dananya di luar perbankan.

- d. Pengaruh Suku Bunga SBI (X_3) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum (Y_1) dan Bank Syariah (Y_2)

Suku Bunga SBI mempunyai pengaruh yang signifikan (nyata) terhadap Dana pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum. Hal tersebut dikarenakan Kecenderungan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank akan meningkat, khususnya pada simpanan deposito bank umum. Tetapi berbeda dengan simpanan pada bank syariah yang akan menurun karena dampak dari meningkatnya simpanan pada bank umum tersebut. Jika tingkat suku bunga SBI yang diberikan rendah, maka masyarakat akan cenderung untuk menginvestasikan dananya pada bidang lain selain perbankan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan analisis Regresi Linier Berganda untuk menguji pengaruh Tingkat Inflasi (X_1), Kurs rupiah terhadap US \$ (X_2), dan Suku Bunga SBI (X_3) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum dan Bank Syariah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Fluktuasinya tingkat inflasi tidak memberikan pengaruh atau dampak yang besar terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum maupun Bank Syariah
- b. Fluktuasi Kurs Rupiah terhadap US \$ tidak memberikan pengaruh atau dampak yang besar terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank Umum maupun bank Syariah karena hanya bersifat sementara.
- c. Suku Bunga SBI mempunyai pengaruh yang sama pada bank Umum dan bank Syariah, hal ini disebabkan karena mengharapkan keamanan nasabah dalam menyimpan pada bank umum dan bank syariah.
- d. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial variabel bebas yang tidak berpengaruh nyata (tidak signifikan) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank Umum dan Bank Syariah adalah inflasi dan kurs Rupiah terhadap US \$.
- e. Berdasarkan ketiga variabel bebas X_1 , X_2 , X_3 , maka variabel yang

paling dominan untuk mempengaruhi variabel Y_1 adalah variabel X_3 yaitu Suku Bunga SBI, sedangkan variabel bebas yang paling dominan untuk mempengaruhi Y_2 adalah X_1 yaitu Tingkat Suku Bunga SBI.

5.2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan tersebut diatas yang berhubungan dengan hasil pembahasan masalah, dikemukakan saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah, dunia perbankan dan penelitian selanjutnya dalam menentukan kebijaksanaan di masa yang akan datang, antara lain :

a. Bagi pihak pemerintah

Agar perbankan tetap menjadi penyokong dan penggerak perekonomian, maka sebaiknya pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik jika adanya pengaruh makro ekonomi terhadap dunia perbankan.

b. Bagi dunia perbankan

Untuk dapat mengantisipasi adanya pengaruh makro ekonomi (eksternal) agar tidak memberikan dampak yang besar pada dana pihak ketiga bank, maka sebaiknya bank-bank umum maupun syariah mencari cara untuk menarik minat masyarakat agar dapat menginvestasikan dananya pada dunia perbankan, misalnya dengan menambah produk-produk bank yang ditawarkan dengan sosialisasi yang lebih baik lagi terutama pada bank syariah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk lebih memantapkan penelitian ini hendaknya melakukan penelitian untuk periode waktu yang berbeda dan menambah atau mengganti variabel bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 2000, "Analisis Regresi Teori Kasus dan Solusi", Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Anonim, 2003, "Pedoman Penyusunan Penelitian dan Skripsi", Penerbit Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jawa Timur.
- _____. 2008, "Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia", Bank Indonesia, Surabaya.
- Boediono, 2001, "Pengantar Ilmu Ekonomi Makro", Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- _____, 2001, "Ekonomi Moneter", Edisi Ketiga, Cetakan Kesebelas, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Dendawijaya, Lukman. 2003, "Manajemen Perbankan", Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasibun, Malayu. 2002, "Dasar-Dasar Perbankan", Edisi Kedua, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Iwardoro, 2004, "Uang dan Bank", Edisi Ketiga, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- _____, 2005, "Uang dan Bank", Edisi Ketiga, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Kasmir, 2003, "Dasar-Dasar Perbankan", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2004, "Pemasaran Bank", Edisi Pertama, Penerbit Prenada Media, Jakarta.
- Manurung, Mandala. 2004, "Uang, Perbankan dan Ekonomi Moneter (Kajian Konsektual Indonesia)", Penerbit FE UI, Jakarta.
- Muhammad. 2004, "Manajemen Bank Syariah", Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Nopirin, 2000, "Ekonomi Moneter", Edisi Pertama, Cetakan Kesepuluh, Buku Kedua, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Puspoprano, 2004, "Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan, Konsep Teori dan Realita", Penerbit Pustaka LP3IS, Indonesia.

- Putong, Iskandar. 2003, "Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro", Edisi Kedua, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rivai, Amali. 2006, "Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan : Bank Syariah VS Bank Konvensional", Jurnal Penelitian.
- Rustianan, 2000, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Penghimpunan Deposito Berjangka Pada Bank Umum di Indonesia", Skripsi UPN "Veteran" JawaTimur.
- Salvatore, D. 2004, "Ekonomi Internasional", Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Siamat, Dahlan. 2004, "Manajemen Lembaga Keuangan", Edisi Keempat, Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta.
- Soelistyo, 2001, "Dasar-Dasar Ekonometrika", BPFE UGM, Yogyakarta.
- Sukirno, Sadono. 2002, "Pengantar Teori Makro Ekonomi", Edisi Kedua, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sumitro, Warkum. 2003, "Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia", Edisi Revisi Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suparmoko, M. 2000, "Pengantar Ekonomi Makro", Edisi Keenam, Penerbit BPFE UGM, Yogyakarta.
- Wahyuningsih, 2002, "Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penghimpunan Dana Tabungan Oleh Perbankan di Surabaya", Skripsi UPN "Veteran" JawaTimur.